

MODEL KINERJA KELEMBAGAAN

[Tinjauan Koperasi Masyarakat Pesisir]



Dr. Muhlis Ruslan, SE., M.Si



Pengantar Oleh Prof. Dr. Ir. H. Muh. Saleh Pallu, M.Eng
Rektor Universitas Bosowa

MODEL KINERJA KELEMBAGAAN
(Tinjauan Koperasi Masyarakat Pesisir)

Penulis : Dr. Muhlis Ruslan, SE., M.Si
Editor : Mas'ud Muhammadiyah | Abdul Kodir
Cover : Abdul Kodir
Diterbitkan Pertama Kali Oleh : Pena Indis
Didistribusikan Oleh: Pastaka AQ

ISBN : 978-602-4290-95-5

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak buku ini sebagian atau seluruhnya, dalam bentuk dan dengan cara apapun juga, baik secara mekanis maupun elektronik, termasuk fotocopy, scan, rekaman, dan lain-lain tanpa izin tertulis dari penulis.

Cetakan Pertama, Desember 2017

117, 21cm

Sanksi pelanggaran pasal 44, Undang-undang No. 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas Undang-undang No.6 Tahun 1982 tentang hak cipta.

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).



KATA PENGANTAR PENULIS

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas taufiq dan hidayah-Nya, sehingga buku ini dapat diselesaikan. Kehadiran buku ini merupakan wujud dari penelitian yang penulis lakukan pada koperasi wilayah pesisir, khususnya di Sulawesi Selatan dan diperkuat dengan telaah pustaka dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul buku ini.

Buku ini membahas tentang Kinerja Lembaga Koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi dipengaruhi oleh sehat organisasi, sehat *financial*, sehat usaha dan kompetensi Sumber Daya Manusia. Namun buku ini masih perlu dilakukan analisis lebih lanjut tentang variabel-variabel lain yang dapat membentuk kinerja kelembagaan koperasi, termasuk memasukkan faktor-faktor ekonomi dan variabel lain yang diduga berkontribusi terhadap ukuran kinerja koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota.

Penulis menyadari bahwa setiap karya dan usaha yang dilakukan oleh penulis, tentu saja masih mengandung keterbatasan dan kekurangan di dalamnya. Oleh sebab itu saran, kritik, dan

masukan yang sifatnya membangun sangat diharapkan demi kebaikan dan kemajuan di masa yang akan datang. Untuk itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Makassar, 27 Oktober 2017
Penulis,

Dr.Muhlis Ruslan, SE.,M.Si

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga buku ini yang berjudul : "Model Kinerja Kelembagaan Koperasi (Tinjauan Koperasi Masyarakat Pesisir)" dapat diselesaikan.

Buku ini menghasilkan suatu model teoritis tentang kinerja kelembagaan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota. Selain itu dapat memberikan dampak terhadap perkembangan ilmu pengetahuan secara teori oleh karena dapat menggeneralisasi variabel kinerja lembaga koperasi. Model teoritik dalam menunjang kinerja lembaga menunjukkan bahwa sehat organisasi, sehat *financial*, sehat usaha, dan kompetensi sumber daya manusia dapat menjadi indikator dalam membentuk kinerja kelembagaan koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi.

Sebagai Rektor Universitas Bosowa selalu mendorong para dosen untuk senantiasa melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan selanjutnya membuat karya ilmiah, seperti buku dan jurnal. Harapan saya agar buku ini menjadi rujukan penting, khususnya bagi para mahasiswa yang sedang mengikuti mata kuliah Ekonomi Koperasi.

Semoga karya Dr. Muhlis Ruslan, SE, M.Si ini dapat membantu dan bermanfaat bagi masyarakat dalam mengelola koperasi.

Makassar, 28 Oktober 2017
Rektor Universitas Bosowa,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "M. Saleh Pallu". The signature is written over a horizontal line and is somewhat stylized.

Prof. Dr. Ir. H. Muh. Saleh Pallu, M. Eng.

activate Wii
Go to Settings to

BAB I

PENDAHULUAN

Lembaga koperasi merupakan salah satu unit ekonomi yang banyak mengalami perkembangan cukup pesat di Indonesia. Keberadaan lembaga koperasi telah banyak berperan di dalam pembangunan sebagai gerakan ekonomi rakyat yang mampu menyatukan masyarakat. Dasar hukum keberadaannya di Indonesia adalah pasal 33 UUD 1945 dan UU No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Dalam pasal 33 ayat (1) UUD 1945 dijelaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan, hal itu sejalan dengan pasal 1 UU No.25/1992 dijelaskan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Fungsi dan peran koperasi sesuai dengan UU No.25/1992 tentang perkoperasian adalah membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya, berperanserta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya, dan

berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Pada bidang ekonomi, peranan koperasi sangat terasa dalam pembangunan nasional karena koperasi banyak berperan dalam membantu meningkatkan penghasilan dan kemakmuran khususnya anggota dan masyarakat pada umumnya, membantu meningkatkan kemampuan usaha, baik perorangan maupun masyarakat, membantu pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan, membantu usaha meningkatkan taraf hidup masyarakat, menyelenggarakan kehidupan ekonomi secara demokratis, membantu pembangunan dan pengembangan potensi ekonomi anggota khususnya dan masyarakat umumnya serta memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional. (Wikipedia, 2014). Rumusan misi Kementerian Koperasi dan UKM menjelaskan bahwa koperasi memberikan kontribusinyata dalam pembangunan nasional melalui perumusan kebijakan nasional yakni; pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kebijakan pemberdayaan di bidang koperasi serta peningkatan sinergi dan peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam rangka meningkatkan produktivitas, daya saing dan kemandirian koperasi secara sistimatis, berkelanjutan dan terintegrasi secara nasional. Menteri

Koperasi dan UKM menegaskan ada tiga faktor yang harus diperkuat untuk meningkatkan daya saing. Ketiga faktor tersebut adalah peningkatan sumber daya manusia, akses pembiayaan murah dan kualitas produksi.

Di usia koperasi yang ke 69 tahun 2016, banyak koperasi yang telah maju dan dapat memberikan manfaat bagi anggota dan masyarakat sekitarnya. Koperasi-koperasi tersebut memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan pemerataan pendapatan, sehingga tingkat kesenjangan atau ketimpangan ekonomi dapat dikurangi. Kitapun juga menyadari, masih banyak koperasi yang belum berhasil, memiliki permasalahan intern, kesulitan permodalan dan persoalan organisasional lainnya. Masih banyak pula anggapan negatif, pandangan pesimis sebagian masyarakat terhadap peran dan fungsi koperasi. Semua ini merupakan tantangan yang harus kita hadapi, untuk mewujudkan amanat dalam UUD 1945 pasal 33, yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Bangun usaha yang sesuai dengan itu adalah koperasi. Rehabilitasi merupakan langkah pembaharuan koperasi diawali dengan pengelolaan dan pemutakhiran data koperasi, melalui Online Database System (ODS), dengan membekuan/ membubarkan koperasi yang tidak

aktif. Juga dilakukan penertiban koperasi melalui pengawasan terpadu dengan membentuk Deputi Pengawasan.

Berdasarkan data yang terhimpun, jumlah koperasi di Indonesia sampai akhir tahun 2015 menyentuh angka 212.135 unit. Namun berdasarkan pendataan, koperasi yang aktif hanya 150.223 unit. Jumlah tersebut didapatkan melalui pemuktahiran data koperasi yang dilakukan dengan Online Database System. Reorientasi, yaitu upaya sistematis untuk merubah paradigma dari pendekatan kuantitas menjadi kualitas. Langkah yang ditempuh untuk meningkatkan kualitas koperasi adalah: Membangun Koperasi Berbasis Informasi Teknologi (IT); Melalui kerjasama dengan Notaris sudah dapat dilakukan penerbitan akte koperasi secara online. Proses pendirian koperasi semakin mudah, cepat, dan efisien. Koperasi juga difasilitasi untuk melakukan RAT secara Online. Demikian juga proses Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK). Dalam reorientasi juga dilakukan penguatan kelembagaan koperasi, serta mendorong koperasi meningkatkan jumlah anggota koperasi. Pengembangan, merupakan agenda permanen yang meliputi upaya: mengkaji regulasi yang menghambat berkembang koperasi; memperkuat akses pembiayaan, dengan menyiapkan koperasi untuk menjadi penyalur KUR; Selanjutnya dikembangkan koperasi sektor riil khususnya yang berorientasi ekspor, padat karya dan memanfaatkan digital ekonomi. Gerakan dan kesadaran untuk

reformasi total tersebut, tidak harus berupa kegiatan yang seragam dan monoton namun hendaknya bersifat serentak, dengan dukungan komitmen dan kerjasama semua pihak yang meliputi pemerintah, dunia usaha, lingkungan akademisi serta seluruh komponen masyarakat. Pemerintah akan terus hadir dan berkomitmen untuk membangun koperasi melalui berbagai kebijakan dan program, dalam bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), kewirausahaan, peningkatan akses pembiayaan, fasilitasi pemasaran, manajemen dan teknologi informasi. Puspayoga (2016).

Data Kementerian Koperasi dan UKM (2015). Pertumbuhan koperasi di Indonesia pada tahun 2014, tercatat sebanyak 209.488 unit, aktif 147.249 unit, tidak aktif 62.239 dan jumlah anggota sebanyak 36.443.953. Tahun 2015 meningkat menjadi 212.135 unit, aktif 150.223, tidak aktif sebanyak 61.912 dan jumlah anggotanya sebanyak 37.783.160. Meningkatnya jumlah koperasi, berimplikasi positif pada jumlah anggotanya. Dari total 212.135 unit koperasi yang ada di Indonesia, sebanyak 8.675 unit berada di Sulawesi Selatan. Angka tersebut menempatkan daerah Sulawesi Selatan sebagai wilayah urutan ke-5 jumlah koperasi terbanyak di Indonesia. Urutan pertama Jawa Timur sebanyak 31.182 unit, kedua Jawa Tengah 28.227 unit, ke-tiga Jawa Barat 25.741 unit, dan ke-empat Sumatera Utara 11.696 unit. Sektor ini diyakini mampu mendorong perekonomian dan menyerap banyak tenaga kerja.

Untuk itu pemerintah terus memberdayakan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah.

Kelembagaan koperasi yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya pada tiga wilayah daerah pesisir Kabupaten/Kota, yakni Kota Makassar, Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Takalar. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UKM (BPS Makassar Dalam Angka, 2015), bahwa Kota Makassar mempunyai 14 Kecamatan memiliki sejumlah 795 unit koperasi yang masih aktif dengan jumlah anggota 3.344 orang, Kabupaten Pangkep memiliki 13 Kecamatan dan terdapat 15 unit koperasi dengan jumlah anggota 2.901 orang (BPS Pangkep Dalam Angka, 2015) dan Kabupaten Takalar memiliki 9 Kecamatan dan terdapat 333 unit koperasi dengan jumlah anggota 26.265 orang (BPS Takalar Dalam Angka, 2015).

Dinas Koperasi dan UMKM Sulsel menjadikan koperasi, usaha mikro kecil dan menengah sebagai pilar perekonomian Sulsel jelang 2018. Membangun Sulsel ternyata tak cukup dengan modal sumberdaya tersebut tapi butuh syarat lain; yaitu kekuatan pilar norma (sosial) yang mengayomi serta organisasi (ekonomi) yang mumpuni. Pilar aturan yang dibingkai dalam satu organisasi berbasis ekonomi kerakyatan. Lalu di manakah pilar itu bisa diwujudkan sebagai basis penggerak kemajuan Sulsel. Sulsel sesungguhnya masuk ke dalam provinsi yang dikategorikan

berkembang pencapaian koperasinya bersama tujuh provinsi lain, Sumbar, Yogyakarta, Bali, NTB, Gorontalo, Sultra, sayangnya, ini berbarengan jumlah koperasi yang jeblok atau tidak aktif. BPS mencatat bahwa pada rentang 2006 hingga 2014 jumlah koperasi yang ada di Sulawesi Selatan sangat besar namun tak banyak yang tak sehat. Pada tahun 2006 terdapat 4.761 yang aktif dari puluhan ribu yang ada, tahun 2007 sebanyak 5.252, tahun 2008 ada 5.327 dan di tahun 2014 justru menurun menjadi 5.051. Hingga 2015, tak kurang dari 7.700 koperasi yang telah terdaftar. Namun, ada sekitar 2.000 koperasi mulai limbung atau tidak aktif. Menurunnya kinerja koperasi disebabkan oleh beberapa faktor eksternal. Di antaranya, kompetisi dengan bank, leasing, pegadaian, atau lembaga keuangan lainnya. Kedua, tidak membuminya semangat berkoperasi, yang terjadi adalah warga diminta berkoperasi karena iming bantuan pemerintah. Koperasi diusung melalui proyek atau agenda pihak luar. Ketiga, kapasitas pengurus yang tak mampu mengelola kompleksitas anggota, dengan kata lain, pengelola sulit beradaptasi atas perubahan eksternalnya. Mereka punya visi tetapi tak sadar kalau mereka tak punya kapasitas merealisasi-kannya. Pemerintah yang diharapkan sebagai penolong malah menjerumuskan ke dalam ketergantungan sistemik, ketergantungan yang diskenariokan sebagai proyek tahunan, atau bantuan berbasis APBD/APBN. Muaranya pemberdayaan semu. AM Yamin 2013.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pertumbuhan koperasi cukup pesat di Indonesia pada umumnya dan Sulawesi Selatan pada khususnya akan tetapi dalam perkembangannya masih terdapat sejumlah permasalahan-permasalahan yang dihadapi apalagi kelembagaan koperasi yang berada pada wilayah pesisir, yakni keterbatasan akses informasi, akses pasar, sumber daya manusia, akses permodalan/pembiayaan, inovasi usaha dan tidak efektifnya penataan kelembagaan. Masyarakat pesisir menurut Victor P.H. Nikijulw, (2003) adalah populasi masyarakat pesisir didefinisikan sebagai kelompok orang yang tinggal di daerah pesisir dan sumber kehidupan perekonomiannya bergantung secara langsung pada pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir. Pesisir memiliki karakteristik yang berbeda dengan desa di wilayah pedalaman. Perbedaan tersebut tidak semata pada aspek geografis-ekologis, tetapi juga pada karakteristik ekonomi dan sosial-budaya. Secara geografis, daerah pesisir berada di perbatasan antara daratan dan lautan.

Pesisir memiliki akses langsung pada ekosistem pantai (pasir atau berbatu), mangrove, estuaria, padang lamun, serta ekosistem terumbu karang. Kondisi geografis-ekologis pesisir mempengaruhi aktivitas-aktivitas ekonomi di dalamnya. Kegiatan ekonomi di desa pesisir dicirikan oleh aktivitas pemanfaatan sumberdaya dan jasa lingkungan pesisir. Aktivitas ekonomi mencakup perikanan,

perdagangan, wisata bahari, dan transportasi. Dengan demikian diperlukan pendekatan yang khas dalam membangun ekonomi maupun kelembagaan lokal sehingga mampu mandiri dan berlanjuti. Kemajuan desa-desa merupakan dasar dari keberlanjutan bangsa sehingga diperlukan strategi makro dan mikro agar dicapai kemakmuran bagi masyarakat desa di segenap penjuru nusantara.

Daru Retnowati (2009) menjelaskan bahwa dalam membangkitkan ekonomi kerakyatan peranan koperasi sangat penting. Namun demikian bila diperhatikan perkembangan perekonomian Indonesia selama 30 tahun ini, kinerja koperasi tampaknya makin jauh tertinggal sebab bila ditelusuri secara eksternal kondisi ekonomi dan politik yang ada tampaknya memang masih kurang kondusif bagi perkembangan koperasi. Sedangkan secara internal dapat ditelusuri dari 5 aspek yaitu aspek kelembagaan, aspek sumber daya manusia, aspek permodalan dan lingkungan eksternal, aspek kemitraan koperasi dengan badan usaha lain, serta peran pemerintah, sehingga untuk mengembangkan koperasi diperlukan peningkatan kualitas kelembagaan baik fungsi koperasi, profesionalisme pengurus, program kerja pengurus baik jangka pendek maupun jangka panjang. Juga peningkatan kualitas sumber daya manusia baik melalui penyuluhan, pelatihan dan pendidikan. Disamping itu upaya memperbesar modal dan mempermudah peminjaman/kredit. Strategi pengembangan

koperasi harus mendapat perhatian pemerintah, perguruan tinggi serta masyarakat luas melalui sistem demokrasi dengan musyawarah melalui RAT yang merupakan keputusan tertinggi. Khususnya dalam mensukseskan diperlukan strategi pengembangan kelembagaan dan koperasi melalui sistem demokrasi untuk memberdayakan ekonomi kerakyatan.

Dari adanya berbagai kekuatan koperasi dan dengan mengeliminir kelemahan yang ada maka koperasi idealnya dapat menjadi aktor penting dalam mendukung perekonomian nasional yang dibangun oleh sebagian besar rakyat yang tergolong dalam kelompok usaha mikro kecil dan menengah dan yang perlu mendapat perhatian adalah bagaimana memposisikan koperasi dalam system perekonomian nasional. Perspektif anggota menjadi peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan koperasi karena anggota sebagai user dan pemilik koperasi, hasil penilaiannya cukup baik berdasarkan peningkatan dalam memperoleh anggota baru dan koperasi juga mampu mempertahankan anggota lama yang dimiliki.

Prawirokusumo, (2001) menyatakan bahwa adanya kesempatan anggota koperasi mengikuti pendidikan dan berkembangnya usaha anggota koperasi menunjukkan adanya tingkat kesejahteraan anggota koperasi. Koperasi secara objektif perlu lebih diberdayakan agar mampu menjadi motor (*engine*) bagi peningkatan kesejahteraan rakyat (*social welfare*), sekaligus

menjadi perangkat yang ampuh untuk lebih pemeratakan kesejahteraan selaras dengan program pengentasan kemiskinan (*poverty alleviation*). Sebagai bentuk manifestasi ekonomi kerakyatan, koperasi merupakan cermin yang tepat bagi pelaksanaan demokrasi ekonomi. Widarmanto (2008).

Pengalaman empiris menunjukkan bahwa persoalan koperasi sebenarnya bukanlah pada kuantitas koperasi itu sendiri, sebab dari tahun ke tahun koperasi tumbuh dimana-mana, terkhusus pada wilayah pesisir akan tetapi lebih pada kualitasnya. Koperasi sebagai salah satu wadah untuk mendorong perkembangan ekonomi masyarakat pesisir secara berkelanjutan, dan keberadaan koperasi pada wilayah pesisir seyogyanya dapat menjadi suatu aset besar bagi masyarakat pesisir dalam upaya memperbaiki taraf hidup mereka secara ekonomi. Akan tetapi keberadaan koperasi di Sulawesi Selatan belum mampu meningkatkan kesejahteraan anggota/masyarakat, padahal bantuan dan kebijakan sudah diberikan dan tidak dapat dipungkiri bahwa pertumbuhan koperasi cukup pesat di Indonesia pada umumnya dan Sulawesi Selatan pada khususnya akan tetapi dalam perkembangannya masih terdapat sejumlah permasalahan-permasalahan yang dihadapi apalagi kelembagaan koperasi yang berada pada wilayah pesisir. Pemberdayaan ekonomi nelayan melalui penguatan kelembagaan koperasi merupakan solusi yang sangat strategis dan relevan. Secara

individu masyarakat pesisir sangat sulit berkembang karena lemahnya kekuatan pasar yang dimiliki, ketidakpastian pendapatan, kelembagaan koperasi yang masih lemah, termasuk kebutuhan modal.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kelembagaan Ekonomi

North (1993) adalah merupakan tokoh ekonomi kelembagaan baru (*new institutional economic*) yang memperoleh nobel ekonomi pada tahun 1993, kelembagaan adalah suatu pola hubungan dan tatanan antara anggota masyarakat atau organisasi yang saling mengikat, diwadahi dalam suatu jaringan atau organisasi, yang dapat menentukan bentuk hubungan antar manusia atau antara organisasi dengan ditentukan oleh faktor-faktor pembatas dan pengikat berupa norma, kode etik aturan formal dan non-formal untuk bekerjasama demi mencapai tujuan yang diinginkan. Pendapat North tersebut jika dikaitkan dengan keberadaan kelembagaan koperasi bahwa ada aturan atau norma yang mengikat untuk dilaksanakan dalam mengelola koperasi, antara lain adanya Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) sebagai suatu aturan dan pedoman untuk mencapai tujuan. Demikian juga dengan Ronald H. Coase pada tahun 1991. Nobel yang diperoleh kedua tokoh tersebut turut menjadi pemicu perkembangan keilmuan ekonomi kelembagaan baru di dunia saat ini. Pemikir ekonomi kelembagaan baru menolak sebagian asumsi ajaran ekonomi klasik/neoklasik dan menganggapnya tidak realistis seperti tidak ada biaya transaksi (*zero transaction cost*) dan rasionalitas instrumental (*instrumental rationality*). Ekonomi klasik

yang mengasumsikan bahwa semua manusia adalah rasional dan bekerja berdasarkan insentif ekonomi ternyata dalam prakteknya banyak faktor-faktor sosial, ekonomi dan politik yang mempengaruhi individu dalam keputusan ekonominya. Pada titik ini ekonomi kelembagaan menjelaskan bahwa kegiatan ekonomi sangat dipengaruhi oleh tata letak antar pelaku ekonomi (teori ekonomi politik), desain aturan main (teori ekonomi biaya transaksi), norma dan keyakinan suatu individu/komunitas (teori modal sosial), insentif untuk melakukan kolaborasi (teori tindakan kolektif), model kesepakatan yang dibikin (teori kontrak), pilihan atas kepemilikan aset fisik maupun non fisik (teori hak kepemilikan), dan lain-lain.

Era Globalisasi saat ini, persaingan dalam bidang ekonomi semakin lama cenderung semakin ketat. Oleh karena itu, setiap perubahan yang terjadi harus diperhitungkan dan diantisipasi. Demikian halnya dengan para pelaku ekonomi khususnya koperasi, terutama terhadap kinerja koperasi yang dituntut untuk cepat tanggap dalam mengambil keputusan untuk mencegah hilangnya peluang yang ada atau sebaliknya akan mendatangkan kerugian bagi koperasi. Sehubungan dengan hal itu, koperasi harus lebih tangguh dalam menghadapi perubahan dan persaingan yang terjadi didalam lingkungan koperasi itu sendiri atau bersaing dengan lembaga keuangan bukan bank lainnya, baik secara nasional, regional, maupun internasional. Koperasi merupakan salah satu lembaga

keuangan bukan bank yang sangat strategis sebagai awal menuju kemandirian. Dalam mewujudkan koperasi yang mandiri, banyak yang harus dihadapi baik masalah intern koperasi seperti permodalan, manajemen, maupun masalah ekstern koperasi seperti mekanisme pasar, campur tangan pemerintah, dan sebagainya. Dari segi kuantitatif perkembangan koperasi cukup banyak, namun secara kualitatif belum sepenuhnya menggembirakan. Oleh karena itu, koperasi harus diarahkan pada orientasi strategis, baik internal maupun eksternal dalam mencaipai tujuan melalui sebuah struktur dan mekanisme dan system yang jelas.

Teori fungsionalisme struktural oleh Talcott Parsons, (1951:5-6) yang diawali dengan empat skema penting mengenai fungsi untuk semua system tindakan, skema tersebut dikenal dengan sebutan skema AGIL. Menurut Parsons ada empat fungsi penting yang mutlak dibutuhkan bagi semua system sosial, meliputi : adaptasi (A), pencapaian tujuan atau goal attainment (G), integrasi (I), dan Latensi (L). empat fungsi tersebut wajib dimiliki oleh semua system agar tetap bertahan (survive), untuk lebih jelasnya dijelaskan sebagai berikut:

1. *Adaptation*: fungsi yang amat penting disini system harus dapat beradaptasi dengan cara menanggulangi situasi eksternal yang gawat, dan system harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan juga dapat

menyesuaikan lingkungan untuk kebutuhannya. Adaptasi dilaksanakan oleh organisme perilaku dengan cara melaksanakan fungsi adaptasi dengan cara menyesuaikan diri dan mengubah lingkungan eksternal.

2. *Goal attainment*; pencapaian tujuan sangat penting, dimana system harus bisa mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya. Fungsi pencapaian tujuan atau *Goal attainment* difungsikan oleh system kepribadian dengan menetapkan tujuan system dan memobilisasi sumber daya untuk mencapainya.
3. *Integrastion*: artinya sebuah system harus mampu mengatur dan menjaga antar hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya, selain itu mengatur dan mengelola ketiga fungsi (AGL).
4. *Latency*: laten berarti system harus mampu berfungsi sebagai pemelihara pola, sebuah system harus memelihara dan memperbaiki motivasi pola-pola individu dan *cultural*. Lalu bagaimanakah Parson menggunakan empat skema diatas, yakni; dengan menyediakan aktor seperangkat norma dan nilai yang memotivasi aktor untuk bertindak.

Dalam hal ini, menurut peneliti bahwa dalam kelembagaan koperasi terdapat struktur yang berfungsi untuk melakukan tindakan

dalam mencapai tujuan. Aspek kelembagaan (keorganisasian) berupa sesuatu yang lebih dinamis yaitu struktur, penetapan peran, tujuan, keanggotaan, dan lain-lain. Dalam artian bahwa dalam sebuah struktur terdapat peran atau fungsi, aktivitas, hubungan antar peran, integrasi sosial, struktur umum yang merupakan sebuah system hubungan kegiatan dengan tujuan. Adaptasi merupakan cara terbaik dalam menyesuaikan diri, baik secara internal maupun eksternal (masyarakat), pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik jika semua sumberdaya yang terlibat dalam sebuah struktur saling beradaptasi dan bekerjasama berdasarkan fungsinya masing-masing dalam mengatur hubungan-hubungan satu dengan lainnya (integrasi), demikian pula organisasi harus melakukan adaptasi dengan lingkungan sekitarnya untuk mempermudah mencapai tujuan (*Goal attainment*) berdasarkan visi misinya dengan memperhatikan kultur dan norma yang berlaku (*latency*). Tingkat integrasi terjadi dengan dua cara, pertama : masing-masing tingkat yang paling bawah menyediakan kebutuhan kondisi maupun kekuatan yang dibutuhkan untuk tingkat atas. Sedangkan tingkat yang di atasnya berfungsi mengawasi dan mengendalikan tingkat yang ada dibawahnya. Parson memberikan jawaban atas masalah yang ada pada fungsionalisme structural dengan menjelaskan beberapa asumsi sebagai berikut;

1. System mempunyai *property* keteraturan dan bagian-bagian yang saling tergantung.
2. System cenderung bergerak kearah mempertahankan keteraturan diri atau keseimbangan.
3. System bergerak statis, artinya ia akan bergerak pada proses perubahan yang teratur.
4. Sifat dasar bagian suatu system akan mempengaruhi bagian-bagian lainnya.
5. System akan memelihara batas-batas dengan lingkungannya.
6. Alokasi dan integrasi merupakan dua hal penting yang dibutuhkan untuk memelihara keseimbangan system.
7. System cenderung menuju kearah pemeliharaan keseimbangan diri yang meliputi pemeliharaan batas dan pemeliharaan hubungan antara bagian-bagian dengan keseluruhan sistem, mengendalikan lingkungan yang berbeda dan mengendalikan kecendrungan untuk merubah system dari dalam.

Program pembangunan di kawasan pesisir diarahkan pada pencegahan dan pengurangan angka kemiskinan yang terjadi di kalangan masyarakat pesisir. Kegiatan yang mungkin dilakukan adalah meningkatkan peranan lembaga-lembaga masyarakat yang berfungsi sebagai wadah partisipasi dan pemberdayaan masyarakat

dalam pembangunan. Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir yang paling relevan adalah melalui penguatan kelembagaan koperasi, Herry Yulistiyono (2007). Sweeden (2008) menyatakan pemahaman ekonomi pesisir memberikan kontribusi ekonomi penting dari ekosistem untuk perekonomian karena beberapa alasan. Pertama, ekosistem pesisir yang sangat produktif dan memberikan kontribusi sejumlah besar nilai ekonomi terhadap perekonomian pesisir. Kedua, semua negara pada umumnya, dan ekonomi pesisir khususnya, memiliki sistem yang kompleks dari kepemilikan, pasar, organisasi produktif, dan pemerintah yang menentukan siapa yang menerima manfaat ekonomi dan yang membayar biaya produksi.

Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa kelembagaan, seperti koperasi merujuk kepada sesuatu yang bersifat strategis yang dinamis di dalam masyarakat. Kelembagaan koperasi adalah kelompok-kelompok sosial yang menjalankan aktivitasnya pada suatu masyarakat yang memiliki tujuan dan system tertentu, dan orang-orang yang terlibat di dalamnya memiliki pola perilaku tertentu serta nilai-nilai dan norma yang harus dilaksanakan berdasarkan AD dan ART koperasi. Dengan demikian masyarakat yang terlibat dalam kelembagaan koperasi merupakan kumpulan orang-orang yang satu sama lain berhubungan dan saling ketergantungan untuk mencapai tujuan, yakni kesejahteraan anggota.

B. Kelembagaan Koperasi

Meskipun batasan kelembagaan dan organisasi berbeda-beda menurut berbagai ahli, namun apa yang dimaksud tersebut adalah merupakan suatu yang berpola dan berfungsi untuk tujuan-tujuan tertentu dalam masyarakat. Oleh sebab itu ekonomi kelembagaan mempelajari dan berusaha memahami peranan kelembagaan dalam sistem dan organisasi ekonomi atau sistem terkait yang lebih luas. Kelembagaan adalah suatu sistem badan sosial atau organisasi yang melakukan suatu usaha untuk mencapai tujuan tertentu. Syahyuti, (2009) kata kelembagaan memiliki inti kajian kepada perilaku dengan nilai, norma dan aturan yang mengikuti dibelakangnya.

Kelembagaan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Sesuai yang tercantum dalam pasal 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, bentuk koperasi ada dua, yakni: Koperasi dapat berbentuk koperasi Primer atau Koperasi Sekunder. Artinya Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang, dibentuk oleh sekurang-kurangnya

20 (duapuluh) orang dan koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi, dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) koperasi. Seiring waktu dan perjalanan sejarah, koperasi tumbuh dan berkembang ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Subandi (2013). Koperasi adalah bentuk kegiatan usaha yg paling ideal, dimana anggotanya, juga bertindak sebagai produsen, sebagai konsumen dan sekaligus sebagai pemilik

Herlina Setiyarini, Wisnu, (2014) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa koperasi menjadi pemikiran Hatta untuk memajukan bangsa Indonesia melalui beberapa ide yang membangun perekonomian rakyat, seperti ide Hatta mempelajari gerakan koperasi di negara-negara Eropa kemudian Hatta terapkan di Indonesia diantaranya koperasi konsumsi, koperasi kredit, dan koperasi produksi untuk meningkatkan perekonomian rakyat yang lemah. Ide Hatta menarik dan dapat membantu meningkatkan ekonomi rakyat. Namun, karena tidak adanya dukungan dari rakyat ide Hatta mengalami kegagalan. Mohammad Hatta dikenal sebagai salah satu pemimpin bangsa, pemikir, dan juga sebagai salah satu peletak dasar Indonesia. Mohammad Hatta dikenal sebagai ekonom Indonesia yang banyak mencurahkan pemikirannya terhadap kemajuan bangsa pada umumnya, dan bidang ekonomi pada khususnya. Mohammad Hatta dikenal sebagai pencetus gerakan

koperasi Indonesia, bahkan mendapat gelar sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Deliar Noer, Mohammad Hatta (1990).

H.Masngudi, (1990). Bahwa sejarah pertumbuhan koperasi di seluruh dunia disebabkan oleh tidak dapat dipecahkannya masalah kemiskinan atas dasar semangat individualisme. Koperasi lahir sebagai alat untuk memperbaiki kepincangan-kepincangan dan kelemahan-kelemahan dari perekonomian yang kapitalistis. Koperasi yang lahir pertama di Inggris (1844) berusaha mengatasi masalah keperluan konsumsi para anggotanya dengan cara kebersamaan yang dilandasi atas dasar prinsip-prinsip keadilan yang selanjutnya dikenal dengan “Rochdale Principles” Waktu yang hampir bersamaan tersebut di Prancis lahir koperasi yang bergerak di bidang produksi dan di Jerman lahir koperasi yang bergerak di bidang simpan- pinjam. Awal pertumbuhan koperasi di Indonesia dimulai sejak tahun 1896. Dipelopori oleh R. Aria Wiratmadja, seorang patih dari Purwokerto (1896) mendirikan koperasi yang bergerak di bidang simpan pinjam. Modal yang diperoleh dari uangnya sendiri dan dari kas masjid. Setelah mengetahui bahwa hal itu tidak boleh, maka ia mengembalikannya secara utuh. Ia terdorong oleh keinginan untuk menolong para pegawai yang makin menderita terjerat oleh lintah darat yang memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi. Kegiatannya lebih lanjut dikembangkan oleh seorang asisten residen Belanda di

Purwokerto bernama De Wolff van Westerrode yang bermaksud mengadakan kredit koperasi untuk penduduk tani yang berdiam dalam daerahnya. Dalam karangannya yang dimuat dalam “ *Tijdschrift voor Nijverheid en Handel* “ tahun 1896 menarik perhatian, isinya mengenai cara bekerjanya yang kemudian menjadi sebuah bank, yang diberi nama “ Poerwokertasche Hulp “. Bank ini menjadi contoh yang pertama bagi Volks credit bank lainnya yang didirikan diseluruh pulau Jawa dan Madura. Bank inilah yang memberikan kredit bagi petani dengan berdasarkan *philantropie* (kedermawanan).

Koperasi modern yang berkembang dewasa ini lahir pertama kali di Inggris, yaitu di kota Rochdale pada tahun 1844. Koperasi timbul pada masa perkembangan kapitalisme sebagai akibat revolusi industri. Pada awalnya, koperasi Rochdale berdiri dengan usaha penyediaan barang-barang konsumsi untuk kebutuhan sehari-hari. Akan tetapi seiring dengan terjadinya pemupukan modal koperasi, koperasi mulai merintis untuk memproduksi sendiri barang yang akan dijual. Perkembangan koperasi sangat mempengaruhi perkembangan koperasi di Inggris maupun di luar Inggris. Kelembagaan, atau institusi, pada umumnya lebih diarahkan kepada organisasi, wadah atau pranata. Organisasi berfungsi sebagai wadah atau tempat, sedangkan pengertian lembaga mencakup juga aturan main, etika, kode etik, sikap dan

tingkah laku seseorang atau suatu organisasi atau suatu system, Tony, (2003). Peneliti menilai bahwa kelembagaan merupakan suatu organisasi yang memiliki aturan main dan system yang ditetapkan oleh pengelola dan pelaksana sebagai sarana dan wadah untuk mencapai tujuan berdasarkan norma dan etik organisasi dan individu.

Pada tahun 1908 Raden Soetomo melalui Budi Utomo berusaha mengembangkann koperasi rumah tangga tetapi kurang berhasil karena dukungan masyarakat sangat rendah. Hal ini disebabkan kasadaran masyarakat akan manfaat koperasi masih sangat rendah. Kemudian sekitar tahun 1913, Serikat Dagang Islam yang kemudian menjadi Sarekat Islam mempelopori berdirinya beberapa jenis koperasi industry kecil dan kerajinan, namun tidak bertahan lama, hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya penyuluhan masyarakat, dan miskinnya pemimpin koperasi pada waktu itu. Setelah itu perkembangan koperasi di Indonesia menunjukkan tanda-tanda yang menggembirakan. Studi Club 1928 sebagai kelompok intelektual Indonesia sangat menyadari peranan koperasi sebagai salah satu alat perjuangan bangsa, sehingga pada tahun 1939 koperasi di Indonesia tumbuh pesat mencapai 1712 buah dan terdaftar sebanyak 172 buah dengan anggota sekitar 14.134 orang. (Subandi, 2013).

Muhammad Hatta menyebutkan bahwa koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum lemah untuk membela keperluan hidupnya. Mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos semurah-murahnya, itulah yang dituju pada koperasi didahulukan kepentingan bersama, bukan keuntungan, dalam bukunya “*The Movement in Indonesia*” beliau mengemukakan bahwa koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong. Mereka didorong oleh keinginan memberi jasa pada kawan “ seorang buat semua dan semua buat seorang” inilah yang dinamakan Auto Aktivitas Golongan, terdiri dari solidaritas, individualitas, menolong diri sendiri, dan jujur. (Subandi, 2013).

ILO *recommendation* nomor 127 pasal 12 (1) dirumuskan bahwa koperasi adalah suatu kumpulan orang-orang yang berkumpul secara sukarela untuk berusaha bersama mencapai tujuan bersama melalui organisasi yang dikontrol secara demokratis, bersama-sama berkontribusi sejumlah uang dalam membentuk modal yang diperlukan untuk mencapai tujuan bersama tersebut dan bersedia turut bertanggung jawab menanggung resiko dari kegiatan tersebut, turut menikmati manfaat usaha bersama tersebut, sesuai dengan kontribusi permodalan yang diberikan orang-orang tersebut, kemudian orang-orang tersebut secara bersama-sama dan langsung turut memanfaatkan organisasi tadi. Menurut *Internasional*

Cooperative Allience (ICA) Koperasi adalah perkumpulan dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi-aspirasi ekonomi, sosial dan budaya bersama, melalui perusahaan yang mereka milik bersama dan mereka kendalikan secara demokratis.

Prinsip-prinsip koperasi. *Internasional Cooperative Allience* (ICA) (1999) merumuskan prinsip-prinsip koperasi adalah:

1. Koperasi adalah perkumpulan sukarela, terbuka bagi semua orang yang mampu menggunakan jasa-jasa perkumpulan dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan tanpa diskriminasi gender, sosial, rasial, politik dan agama,
2. Koperasi adalah perkumpulan demokratis, dikendalikan oleh para anggotanya yang secara aktif berpartisipasi dalam penetapan kebijakan-kebijakan perkumpulan dan mengambil keputusan-keputusan,
3. Anggota koperasi menyumbang secara adil dan mengendalikan secara demokratis, modal dari koperasi mereka,
4. Koperasi bersifat otonom, merupakan perkumpulan yang menolong diri sendiri dan dikendalikan oleh anggota-anggotanya,
5. Koperasi menyelenggarakan pendidikan bagi anggotanya, para wakil yang dipilih, manajer dan karyawan, agar mereka

dapat memberikan sumbangan yang efektif bagi perkembangan koperasi,

6. Koperasi dapat memberikan pelayanan paling efektif kepada para nggotanya dan memperkuat gerakan koperasi dengan cara kerjasama melalui struktur lokal, nasional, regional, dan internasional,
7. Koperasi bekerja bagi pembangunan yang berkesinambungan dari komunitas mereka melalui kebijakan yang disetujui anggotanya.
8. Jenis koperasi berdasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya yang dapat dikelompokkan sebagai berikut:
 - a. Koperasi Produsen. Koperasi yang anggotanya terdiri atas para produsen.
 - b. Koperasi Konsumen. Koperasi yang anggotanya terdiri dari para konsumen.
 - c. Koperasi Jasa. Koperasi yang khusus melakukan kegiatan usaha memberi jasa kepada anggota dan masyarakat.
 - d. Koperasi Simpan Pinjam/Kredit. Koperasi yang kegiatan usahanya memberikan pinjaman kepada anggota dengan bunga ringan.
 - e. Koperasi Serba usaha

Selanjutnya Soedjono (1997) menyatakan, keberhasilan koperasi dari segi usaha mencakup aspek peningkatan jumlah anggota, modal koperasi, jumlah dan volume usaha, pelayanan sosial kepada anggota, dan kesejahteraan anggota. Keberhasilan koperasi dari segi organisasi mencakup aspek produktivitas, efektivitas, keadilan, dan kemantapan. Selanjutnya Ropke, (1997) menjelaskan bahwa bertambahnya jumlah anggota yang dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan SHU. Akan tetapi menurut peneliti bahwa walaupun peningkatan jumlah anggota koperasi jika anggota tidak merasa memiliki dan tidak memberi kontribusi pengembangan usaha koperasi, maka kinerja koperasi belum memberikan dampak positif. Demikian pula modal koperasi yang terhimpun jika tidak dikelola pada usaha-usaha yang produktif maka tentu saja koperasi tersebut tidak akan berkembang, terlebih jika pengurus tidak transparan mengelola keuangan. Ekonomi kerakyatan yang dimanifestasikan melalui koperasi memiliki pijakan konstitusional yang kuat dan bergayut langsung dengan nadi kehidupan rakyat kecil.

Sistem koperasi menggambarkan interaksi di antara organisasi dan koperasi, di satu pihak dengan para anggotanya di pihak lainnya, berlaku norma-norma dan prinsip koperasi, rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi. Fungsi anggota sebagai pemilik yang membiayai, mengendalikan, mengawasi,

mengevaluasi dan mengambil keputusan-keputusan yang diwujudkan pada partisipasi mereka di dalam penyelenggaraan rapat anggota. Laporan pengurus koperasi kepada rapat anggota menggambarkan pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen (perencanaan, pengorganisasian dan control) serta fungsi-fungsi perusahaan koperasi (sumber daya manusia, keuangan, produksi layanan dan penyebaran informasi), karena itu kualitas dan kontinuitas penyelenggaraan rapat anggota menjadi indikator penting di dalam system pengorganisasian koperasi yang secara *built-in* mencerminkan implementasi dari nilai, norma dan prinsip-prinsip koperasi tersebut. Untuk itu, berbagai norma/aturan tentang organisasi dan usaha koperasi harus disusun secara rinci, mudah dimengerti, disosialisasikan dan ditaati. Mengukur kinerja koperasi baik sebagai unit-unit ekonomi mikro maupun makro sebagai gerakan ekonomi rakyat dapat dilakukan dari berbagai segi menurut kepentingannya, tetapi indikator apapun yang hendak ditampilkan seharusnya tidak terlepas dari dasar pengevaluasiannya yaitu tujuan dikembangkannya kehidupan berkoperasi dalam upaya membangun ekonomi secara mandiri. Arifin, (2010).

Menurut hemat peneliti bahwa jika prinsip-prinsip koperasi dipegang teguh oleh pengurus, pengawas dan anggota serta berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi dan konsisten melaksanakan RAT setiap tahun dan

pemangku kepentingan (Dinas Koperasi) aktif memberikan bimbingan dan evaluasi, maka tujuan koperasi untuk mensejahterakan anggota akan terwujud. Hal itu sejalan dengan pendapat Ketua Koperasi Berkat bahwa sepanjang ada kesungguhan dan sikap profesionalisme pengurus dalam mengelola koperasi maka koperasi bisa menjadi wadah pengembangan ekonomi anggota dan pengurus. Kaharuddin Aziz, (2015).

Sitio, (2001) mengatakan bahwa anggota koperasi harus berperan aktif, memiliki komitmen, dan mampu berinovasi untuk memajukan koperasi, sehingga koperasi sebagai wadah dalam melakukan aktivitas ekonomi dapat memberikan kesejahteraan bagi para anggotanya. Oleh sebab itu, status keanggotaan koperasi menjadi basis utama bagi perkembangan dan kelanjutan hidup usaha koperasi. Komitmen organisasi adalah sebagai suatu keadaan dimana seseorang karyawan memihak organisasi tertentu serta tujuan tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut. Cut Zurnali, (2010) menyatakan bahwa perhatian umum dan tujuan kunci dari unit organisasi SDM adalah untuk mencari pengukuran yang dapat mengestimasi secara akurat komitmen para pekerjanya dan mengembangkan program-program dan kegiatan-kegiatan yang meningkatkan komitmen pada organisasi. Lebih lanjut dikemukakan bahwa kajian penelitian yang luas dalam ilmu

psikologi dan manajemen adalah tentang konsep dan peranan komitmen organisasional (*organizational commitment*).

Dalam kajian tentang komitmen organisasional mencoba menganalisis karyawan-karyawan perusahaan yang dalam menjalankan aktivitas organisasi bersentuhan dengan teknologi informasi dan komunikasi seperti perusahaan telekomunikasi dan informasi, perbankan, pertambangan, pemasaran, konsultan perencanaan, otomotif, semi konduktor, dan bioteknologi, Cut Zurnali (2010) mendefinisikan masing-masing dimensi komitmen organisasional tersebut sebagai berikut:

1. Komitmen afektif (*affective commitment*) adalah perasaan cinta pada organisasi yang memunculkan kemauan untuk tetap tinggal dan membina hubungan sosial serta menghargai nilai hubungan dengan organisasi dikarenakan telah menjadi anggota organisasi.
2. Komitmen kontinyu (*continuance commitment*) adalah perasaan berat untuk meninggalkan organisasi dikarenakan kebutuhan untuk bertahan dengan pertimbangan biaya apabila meninggalkan organisasi dan penghargaan yang berkenaan dengan partisipasi di dalam organisasi.

3. Komitmen normatif (*normative commitment*) adalah perasaan yang mengharuskan untuk bertahan dalam organisasi dikarenakan kewajiban dan tanggung jawab terhadap organisasi yang didasari atas pertimbangan norma, nilai dan keyakinan karyawan. (Wikipedia. Komitmen Organisasi, 2014)

Robbins dan Judge (2007) mendefinisikan komitmen sebagai suatu keadaan dimana seorang individu memihak organisasi serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi. Komitmen terhadap organisasi artinya lebih dari sekedar keanggotaan formal, karena meliputi sikap menyukai organisasi dan kesediaan untuk mengusahakan tingkat upaya yang tinggi bagi kepentingan organisasi demi pencapaian tujuan. Komitmen adalah kekuatan relatif individu dalam melibatkan dirinya dengan mempertahankan nilai dan tujuan organisasi. Brian, (2008).

Johannessen, Olsen, and Lumpkin, (2011), Kemampuan berinovasi adalah kemampuan anggota menghasilkan ide-ide atau gagasan kreatif yang diwujudkan dalam bentuk inovasi yang bersifat kebaruan. Oleh sebab itu, karakteristik suatu kelembagaan seperti koperasi, berkewajiban memberikan kontribusi kinerja pada organisasinya. Dipihak yang lain anggota sebagai pemakai mempunyai hak untuk memperoleh insentif atau manfaat dari

organisasi koperasi. Dengan demikian anggota koperasi mempunyai kedudukan sentral dalam koperasi sebagai suatu kelembagaan ekonomi. Solusi yang diperlukan untuk memberdayakan koperasi sekarang ini adalah adanya komitmen yang kuat dan sekaligus upaya nyata dari pihak-pihak terkait khususnya pemerintah, gerakan koperasi dan lembaga koperasi untuk melakukan pembenahan dalam rangka pemurnian dan revitalisasi kegiatan usaha serta penguatan pembiayaan koperasi. Alternatif pemurnian kelembagaan koperasi dapat dilakukan dengan;

- a. Memperbaiki dan melengkapi aturan perundang-undangan (mempercepat proses penyusunan dan pengesahan RUU per koperasian);
- b. Melakukan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan kepada anggota pengurus dan Pembina koperasi dengan materi dan metoda yang tepat, agar mereka benar-benar mengetahui dan mengerti koperasi secara utuh (Koperasi yang genuine);
- c. Melakukan sosialisasi/promosi melalui media yang tepat terarah dan terencana serta berkesinambungan;
- d. Menyusun standar dan metoda yang tepat bagi mata ajaran koperasi untuk mendukung kaderisasi koperasi ditingkat pendidikan dasar, menengah dan perguruan tinggi serta;

- e. Menyerahkan sebagian besar tugas dan tanggung jawab pembinaan dan pengembangan koperasi kepada gerakan koperasi sendiri.

Kemampuan suatu perusahaan dalam berinovasi, tidak diragukan lagi dapat meningkatkan keunggulan bersaing. Terlebih di era Freemium dewasa ini, dimana konsumen semakin menuntut barang atau jasa yang berkualitas dengan harga yang justru semakin terjangkau, bahkan gratis. Sayangnya, proses inovasi tidak selalu berjalan mulus. Hasil riset yang digelar PPM Manajemen *Center of Innovation and Collaboration* (CIC) dengan mensurvei 164 perusahaan di Indonesia menyebutkan hampir 80% perusahaan di Indonesia menyatakan bahwa faktor biaya adalah salah satu faktor penghambat aktivitas inovasi, inovasi tidak serta-merta berkembang hanya dengan menambah dana R&D. Tantangan terbesar justru terletak pada upaya menggerakkan seluruh karyawan yang *notabene* adalah pelaku aktivitas inovasi itu sendiri, dan untuk memahami pentingnya berinovasi bagi kelangsungan dan keunggulan perusahaan. (Wikipedia, 2014)

Anggota koperasi memiliki kewajiban antara lain: (1) Mematuhi AD/ART, (2) Partisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan koperasi, (3) Mengembangkan kebenaran berdasarkan atas azaz-azaz kekeluargaan. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga koperasi merupakan keseluruhan aturan

yang mengatur secara langsung kehidupan koperasi dan hubungan antara koperasi dengan para anggotanya. Anggota koperasi juga memiliki hak antara lain:

1. Memilih atau dipilih menjadi anggota pengurus atau pengawas
2. Meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga,
3. Memanfaatkan koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota,
4. Perangkat organisasi koperasi terdiri dari rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Rapat anggota memiliki wewenang antara lain; (a) Menetapkan anggaran dasar, (b) Menetapkan pembagian sisa hasil usaha dan (c) Menetapkan pertanggung jawaban pengurus dalam melaksanakan tugasnya.

Tugas-tugas pengurus adalah; (1) mengelola koperasi dan usahanya, (2) menyelenggarakan rapat anggota, (3) memelihara daftar buku anggota dan pengurus, (4) pengawas dipilih dari dan oleh koperasi dalam rapat anggota. Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota pengawas ditetapkan dalam anggaran dasar. Tugas pengawas: (a) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi, (b) membuat

laporan tertulis tentang hasil pengawasan, dan wewenang pengawas adalah meneliti catatan yang ada pada koperasi dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan. Dengan demikian, keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya dapat diukur dari peningkatan kesejahteraan anggota. Kesejahteraan bermakna sangat luas dan juga bersifat relatif, karena ukuran sejahtera bagi seseorang dapat berbeda satu sama lain. Keberhasilan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi anggotanya akan lebih mudah diukur, apabila aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh anggota dilakukan melalui koperasi. Dalam pengertian ekonomi, tingkat kesejahteraan itu dapat ditandai dengan tinggi rendahnya pendapatan riil. Apabila pendapatan riil seseorang meningkat atau masyarakat meningkat, maka kesejahteraan ekonomi seseorang atau masyarakat tersebut meningkat pula. Berkaitan dengan jalan pikiran tersebut, maka apabila tujuan koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggotanya, maka berarti pula tujuan koperasi itu diwujudkan dalam bentuk meningkatnya pendapatan (riil) para anggotanya. Dengan demikian, pengertian kesejahteraan yang bersifat abstrak dan relatif tersebut dapat diubah menjadi pengertian yang lebih konkrit dalam bentuk pendapatan, sehingga pengukurannya dapat dilakukan secara nyata.

Menurut Syahyuti, (2006), komponen kelembagaan adalah

:

1. Person. Orang-orang yang terlibat di dalam satu kelembagaan dapat diidentifikasi dengan jelas.
2. Kepentingan. Orang-orang tersebut sedang diikat oleh satu kepentingan/ tujuan, sehingga mereka terpaksa harus saling berinteraksi.
3. Aturan. Setiap kelembagaan mengembangkan seperangkat kesepakatan yang dipegang secara bersama, sehingga seseorang dapat menduga apa perilaku orang lain dalam lembaga tersebut.
4. Struktur. Setiap orang memiliki posisi dan peran, yang harus dijalankannya secara benar. Orang tidak bisa merubah-rubah posisinya dengan kemauan sendiri.

Menurut Saudin Sijabat, (2010). Pengendalian anggota pada kelembagaan koperasi yang menjadi penekanan dalam organisasi dan manajemen koperasi adalah:

- a. Pengendalian anggota pada kelembagaan koperasi yang menjadi penekanan dalam organisasi dan manajemen koperasi adalah :
 - 1) Pengurus, Pengawas dan Karyawan Koperasi
 - 2) Kelengkapan dan pemeliharaan administrasi organisasi
 - 3) Rencana Pengembangan Usaha Koperasi
 - 4) Penyelenggaraan rapat anggota, rapat pengurus dan rapat pengawas, pendidikan koperasi, dan kunjungan.
- b. Usaha Koperasi.

Hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan untuk mengevaluasi usaha koperasi adalah dampak berupa manfaat yang diberikan oleh usaha tersebut kepada lembaga dan anggota koperasi. Artinya harus memperhatikan usaha yang memberikan manfaat kepada anggota dan pertimbangan perolehan pendapatan dari usaha tersebut.

c. Laporan Pengurus

Laporan pengurus secara tertulis harus disampaikan oleh pengurus kepada anggota paling tidak seminggu sebelum pelaksanaan rapat. Hal tersebut diperlukan agar setiap anggota mempunyai waktu untuk mempelajari dan mengevaluasi laporan dimaksud secara cermat. Dokumen Bahan Pengendalian Anggota pada Koperasi.

Dari perkembangan pelaksanaan rapat anggota yang biasa dilakukan oleh koperasi, beberapa hal yang menjadi pokok bahasan dan perlu dicermati sebagai bahan pengendalian koperasi oleh anggota adalah sebagai berikut: 1) Susunan Acara Rapat, 2) Tata Tertib Rapat, 3) Berita Acara Rapat, 4) Perkembangan Organisasi, 5) Susunan Pengurus, Pengawas, 6) Daftar Karyawan Koperasi, 7) Surat Masuk dan Keluar, 8) Daftar simpanan anggota, 9) Ilustrasi Neraca 2 tahun terakhir, 10) Laporan Perhitungan Hasil Usaha, 11) Laporan Perhitungan Pembagian SHU, 12) Laporan arus kas, 13)

Laporan perubahan kekayaan bersih, dan, 14) Laporan perubahan inventaris.

Pengelolaan koperasi tergantung dari berbagai faktor, akan tetapi pada umumnya setiap koperasi akan berpedoman pada “Tiga Sehat”. Adapun pedoman tiga sehat itu meliputi (blogspot.com, online 2 Agustus 2016) :

1. Organisasi Sehat

- a. Adanya kelancaran komunikasi antara para pengurus antara pengurus dengan anggota, dan antara sesama anggota yang tercermin pada administrasi dan manajemen.
- b. Adanya kesadaran sekurang-kurangnya pengertian para anggota, bahwa mereka memiliki koperasi dan bersedia ikut serta pada kegiatan koperasi. Sehat organisasi dalam arti bahwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi dapat dijalankan sesuai ketentuan yang ada sehingga tidak ada lagi benturan-benturan yang terjadi dalam pelaksanaan di lapangan karena semua pihak telah mengikuti aturan yang ada dalam AD maupun ART, begitu juga kesadaran antara anggota maupun pengurus d) dapat terjalin dengan baik agar koperasi dapat berjalan sebagaimana mestinya tanpa ada pihak yang merasa

dirugikan. Hal itu dapat dilihat dari perkembangan usaha, neraca, dan hasil rapat anggota tahunan koperasi

2. Usaha Sehat

- a. Kegiatannya dijalankan dengan berdasarkan pada asas dan sendi dasar koperasi.
- b. Usahanya berjalan secara kontinu, dan setiap tahun buku terdapat sisa hasil usaha, setelah dipenuhi ketentuan yang seharusnya berlaku bagi tiap perusahaan.
- c. Ikut sertanya anggota diimbangi dengan jasa oleh koperasi kepadanya dan minimal anggota merasa tidak kecewa terhadap pelayanan yang diberikan oleh koperasinya.
- d. Dapat dicapai tingkat efisiensi sesuai dengan rencana untuk memper-pendek arus barang antara produsen, dan konsumen anggota.

C. Sehat Organisasi

Suatu organisasi yang sehat dapat diukur dengan melihat pada sejauhmana organisasi tersebut dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Konsep sehat organisasi yang dikemukakan para ahli organisasi dan manajemen memiliki makna yang berbeda, tergantung pada kerangka acuan yang dipergunakan. Hussien (2014) dalam organisasi, kecenderungan seseorang untuk turut aktif

mengambil peran dalam menentukan kelangsungan hidup koperasi dalam melalui rapat keanggotaan. Oleh sebab itu, peneliti dapat menguraikan bahwa kecenderungan seseorang dalam organisasi harus berpartisipasi aktif memberikan kontribusi dalam kegiatan rapat-rapat tentang kemajuan koperasi, menjadi tanggung jawab anggota terhadap akuntabilisasi kinerja koperasi.

Charles B.Lowry and Paul J. Hanges, (2008) mengatakan konsep organisasi yang sehat merupakan salah satu yang memiliki profil yang di dalamnya beberapa iklim dimensi bekerja untuk menjaga sinergitas organisasi dan daya tanggap lembaga. Organisasi yang sehat melakukan kebijakan, praktik, dan prosedur yang memberdayakan karyawan dan hanya menekankan pentingnya terus menerus pembelajaran dan inovasi yang bersifat timbal balik untuk memenuhi tuntutan tersebut dari sebuah lingkungan yang selalu berubah, hal itu semua akan menentukan efektivitas organisasi dalam jangka panjang. Untuk itu, peneliti menilai bahwa anggota koperasi harus mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi dan tingkat pertanggungjawaban anggota koperasi berkaitan dengan kemajuan koperasi serta bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang diberikan. Barrett, Pamela Bowen, (2001) berpendapat bahwa Penetapan AD & ART merupakan pertanggungjawaban pengurus sebagai cerminan akuntabilitas koperasi.

Moeheriono (2012), menjelaskan bahwa salah satu variabel pembentuk kompetensi inti organisasi yg baik adalah dari kompetensi individu karyawannya itu sendiri, antara lain percaya diri, mampu mengeluarkan pendapat. Organisasi dikatakan sukses bila organisasi tersebut dapat melandasi kegiatannya dengan kreativitas inovasi yang tinggi, pengetahuan (*knowladge*) dan keterampilan/skill dari karyawannya. Seluruh karyawan harus mengikuti dari visi, misi organisasi, strategi program, semua itu diapresiasi dengan kompetensi inti karyawan. Artinya menurut peneliti bahwa seluruh aktivitas individu anggota koperasi berdasarkan AD dan ART dan aktif menghadiri pelaksanaan rapat jika diundang. Robbins, (1996) menjelaskan, organisasi dipandang pula sebagai satuan sosial yang dikoordinasi secara sadar, yang tersusun atas dua orang atau lebih, yang berfungsi atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan atau seperangkat tujuan bersama. Pendapat peneliti bahwa anggota yang terlibat dalam kepengurusan koperasi hendaknya aktif memberi peran kapan saja dan di mana saja, terkhusus apabila dilaksanakan rapat-rapat koperasi. Sejalan dengan pendapat Hussain (2014) bahwa dalam rapat keanggotaan koperasi, kecenderungan seseorang untuk turut aktif mengambil peran dalam menentukan kelangsungan hidup koperasi.

SB Hari Lubis (1987), bahwa Organisasi sebagai suatu kesatuan sosial dari sekelompok manusia yang saling berinteraksi menurut suatu pola tertentu sehingga setiap anggota organisasi memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing, sebagai suatu kesatuan mempunyai tujuan tertentu dan mempunyai batas-batas yang jelas, sehingga dapat dipisahkan secara tegas dari lingkungannya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa dimensi organisasi dapat dibedakan dalam dimensi struktural dan dimensi kontekstual yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Dimensi Struktural, menggambarkan karakteristik internal suatu organisasi yang terdiri atas; 1) Formalisasi, menunjukkan tingkat penggunaan dokumen tertulis dalam organisasi yang menggambarkan perilaku serta kegiatan organisasi, 2) Spesialisasi, menunjukkan derajat pembagian kerja dalam organisasi, 3) Standardisasi, menggambarkan derajat kesamaan dalam pelaksanaan kerja, 4) Sentralisasi, menunjukkan pembagian kekuasaan menurut hirarki dalam organisasi, 5) Hirarki Otoritas, menggambarkan pola pembagian kekuasaan serta rentang kendali secara umum, 6) Kompleksitas, menunjukkan banyaknya kegiatan (sub sistem) dalam organisasi yang terdiri kompleksitas vertikal dan

horizontal, 7) Profesionalisme, menunjukkan tingkat pendidikan formal ataupun non formal rata-rata yang dimiliki anggota, dan 8) Konfigurasi, menunjukkan bentuk pembagian anggota organisasi ke dalam bagian-bagian secara vertikal maupun horisontal.

2. Dimensi Kontekstual, menggambarkan karakteristik keseluruhan suatu organisasi yang mencakup : 1) Ukuran organisasi, menunjukkan jumlah anggota organisasi, 2) Teknologi organisasi, menunjukkan jenis dan tingkat teknologi dari sistem produksi organisasi, 3) Lingkungan, menggambarkan keadaan elemen lingkungan yang terdapat di luas batas-batas organisasi terutama elemen lingkungan yang berpengaruh terhadap organisasi.

Malayu SP Hasibuan (2001), menjelaskan bahwa organisasi mengandung unsur-unsur yang membentuk keberadaan organisasi, sebagai berikut :

1. Manusia (*human factor*), artinya organisasi baru ada jika ada unsur manusia yang bekerja sama, ada pemimpin, dan ada yang dipimpin.
2. Tempat kedudukan, artinya organisasi baru ada jika ada tempat kedudukannya.

3. Tujuan, artinya organisasi baru ada jika ada tujuan yang ingin dicapai.
4. Pekerjaan, artinya organisasi baru ada jika ada pekerjaan yang akan dikerjakan serta adanya pembagian pekerjaan.
5. Struktur, artinya organisasi baru ada jika ada hubungan dan kerja sama antara manusia yang satu dengan yang lainnya.
6. Teknologi, artinya organisasi baru ada jika terdapat unsur teknis.
7. Lingkungan (*environmental external social system*), artinya organisasi baru ada jika ada lingkungan yang saling mempengaruhi seperti adanya sistem kerja sama social.

Rummler, Brache dan Madron (1995), menyokong pendapat di atas. Jadi berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang baik, maka sistem organisasi harus dibentuk dengan baik sehingga dapat melicinkan proses dan hubungan kerja yang baik antara pimpinan dan anggota.

D. Sehat Usaha

Dampak mikro yang bersifat langsung terhadap para anggota dan perekonomiannya yang timbul dari peningkatan jasa pelayanan

koperasi dan dari kegiatan-kegiatan kelompok koperasi. Hal yang menjadi dasar pertimbangan untuk kegiatan usaha koperasi adalah dampak berupa manfaat yang diberikan atas usaha tersebut kepada lembaga dan anggota koperasi. Artinya harus memperhatikan usaha yang memberikan manfaat kepada anggota dan pertimbangan perolehan pendapatan dari usaha tersebut serta upaya-upaya strategi dalam perkembangan usaha. Yona Perwitasari, dkk (2013), Faktor pendukung yang mampu mendukung berkembangnya berbagai bidang usaha di koperasi ini adalah sebagai berikut:

1. Kepercayaan anggota yang didukung dengan manajemen yang solid;
2. Modal yang besar/ kepemilikan modal yang kuat membuat koperasi ini terus berkembang;
3. Sarana prasarana yang baik guna memudahkan segala bentuk pengelolaan bidang usaha–bidang usaha dalam koperasi ini. Adapun cara mengoptimalkan segala faktor pendukung tersebut adalah sebagai berikut:
 - 1) Sistem informasi yang terbuka melalui beberapa sosialisasi yang telah dilakukan dengan anggotanya melalui pengumuman yang ditempel untuk segi bidang usahanya, untuk kinerja keuangannya biasanya dibagikan dengan buku laporan pertanggungjawaban pada saat RAT;

- 2) Permodalan digunakan untuk menaikkan plafon pinjaman agar banyak yang terserap ke anggota sehingga adanya modal itu, sebenarnya tidak semata-mata hanya untuk disimpan saja atau didepositokan;
- 3) Sarana prasarana dipakai dengan baik agar sarana dan prasarana ini mampu dimanfaatkan secara maksimal

Dampak makro yang bersifat tidak langsung terhadap lingkungan organisasi koperasi dapat secara serentak memberikan kontribusi pada perkembangan sosial dan ekonomi. Dampak-dampak persaingan dari koperasi, pembentukan suatu perusahaan koperasi dalam situasi pasar yang ditandai oleh persaingan, akan memaksa para pesaing lainnya untuk memperbaiki dan meningkatkan pelayanan mereka. (Wikipedia, 2014). Karakteristik individu berhubungan dengan peranan perbedaan individu para pekerja dalam hubungan dengan efektifitas. Para individu pekerja mempunyai pandangan yang berlainan, tujuan dan kemampuan yang berbeda-beda pula. Variasi sifat pekerja ini yang sedang menyebabkan perilaku orang yang berbeda satu sama lain. Perbedaan tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap efektifitas organisasi. Dua hal tersebut adalah rasa keterikatan terhadap organisasi dan prestasi kerja individu.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka sehat usaha koperasi dapat diwujudkan jika layanan konsultasi usaha berjalan, kebutuhan

anggota terpenuhi, peran serta anggota dalam perkembangan usaha, peran membangun kerjasama dalam hal perencanaan usaha, menyusun laporan usaha dan partisipasi anggota menemukan dan memanfaatkan peluang usaha. Sumber daya manusia yang terlibat didalamnya harus memenuhi kewajiban-kewajibannya agar sehat usaha koperasi berjalan dengan efektif. Usaha tersebut diatur sesuai dengan ketentuan yang telah diatur sesuai keinginan para anggota melalui musyawarah rapat anggota dan senantiasa membuat laporan perkembangan usaha secara terbuka.

E. Sehat *Financial*

Manajemen keuangan adalah suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh suatu organisasi atau perusahaan. Seorang manajer keuangan dalam suatu perusahaan harus mengetahui bagaimana mengelola segala unsur dan segi keuangan, hal ini wajib dilakukan karena keuangan merupakan salah satu fungsi penting dalam mencapai tujuan perusahaan. Unsur manajemen keuangan harus diketahui oleh seorang manajer. Misalkan saja seorang manajer keuangan tidak mengetahui apa-apa saja yang menjadi unsur-unsur manajemen keuangan, maka akan muncul kesulitan dalam menjalankan suatu perusahaan tersebut. Oleh sebab itu, seorang manajer keuangan harus mampu

mengetahui segala aktivitas manajemen keuangan, khususnya penganalisisan sumber dana dan penggunaannya untuk merealisasikan keuntungan maksimum bagi perusahaan tersebut. Seorang manajer keuangan harus memahami arus peredaran uang baik eksternal maupun internal.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Holmberg, Anitha; Frommegard, Lennart. (2005) bahwa pembiayaan terbaik menciptakan solusi yang baik. Untuk itu Aktivitas manajemen manajemen keuangan berhubungan dengan aktivitas penggunaan dana, yaitu aktivitas untuk menginvestasikan dana pada berbagai aktiva. Aktivitas perolehan dana, yaitu aktivitas untuk mendapatkan sumber dana, baik dari sumber dana internal maupun sumber dana eksternal perusahaan, dan aktivitas pengelolaan aktiva, yaitu setelah dana diperoleh dan dialokasikan dalam bentuk aktiva, dana harus dikelola seefisien mungkin.

Ramudi Ariffin, (2010) menjelaskan bahwa layanan perusahaan koperasi terhadap kebutuhan dan kepentingan ekonomi anggota identik dengan partisipasi anggota dalam kedudukannya sebagai pelanggan (pengguna jasa) koperasi, bukan “penjualan” barang/jasa seperti layaknya ke konsumen di pasar. Layanan perusahaan koperasi kepada anggota mengandung muatan kewajiban untuk memberi dampak peningkatan perekonomian anggota. Hal tersebut sesuai pendapat yang dikemukakan oleh

Gagliardi, Francesca, (2009) bahwa pertumbuhan dan perkembangan keuangan perusahaan koperasi dapat dilihat dari SHU yang dicapai.

Dengan demikian, pengertian SHU adalah sisa dari partisipasi anggota di dalam membiayai organisasi koperasi, bukan laba yang pengertiannya sebagai balas jasa terhadap modal. Perkembangan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. UU No. 25/1992, tentang Perkoperasian, Bab IX, pasal 45. Peneliti berpendapat berdasarkan penjelasan di atas, bahwa sehat *financial* dapat tercapai jika aktivitas pengurus secara optimal melakukan tingkat perputaran dana seefektif mungkin dalam kegiatan pembiayaan operasional koperasi, seperti peningkatan perkembangan usaha, peningkatan pertumbuhan usaha, peningkatan jumlah pembagian SHU dan transparansi melaksanakan pelaporan perkembangan pelaporan penggunaan dana, pelaporan perkembangan perputaran dana koperasi, pelaporan jasa simpan pinjam dan senantiasa melakukan kegiatan evaluasi pendanaan.

F. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Pengembangan SDM menjadi salah satu isu sentral pembangunan daerah untuk mendukung upaya meningkatkan dan

memperluas kesejahteraan rakyat, dimana pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus memastikan bahwa layanan pendidikan tersedia secara memadai dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Satuan pendidikan mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi harus dapat mengakomodasi setiap anak usia sekolah yang memerlukan layanan pendidikan. Bahkan, layanan pendidikan harus dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, yang bermukim di daerah tertinggal, kepulauan, terpencil dan perbatasan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib membangun infrastruktur pendidikan untuk mendukung peningkatan layanan pendidikan yang bermutu bagi masyarakat di wilayah tersebut. Untuk itu, pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus bersinergi dalam memberikan layanan pendidikan agar kinerja pendidikan di setiap daerah makin meningkat. (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, (2012).

Diera globalisasi saat ini, fenomena koperasi sebagai salah satu usaha mikro, kecil dan menengah yang ternyata bisa bertahan dan berkembang dalam situasi krisis global, menunjukkan bahwa peran koperasi sangatlah penting dalam peningkatan perekonomian terutama bagi sektor menengah ke bawah. Keberadaan koperasi tersebut agar bisa berkembang dan bersaing harus memiliki manajemen yang bagus dan didukung oleh SDM yang professional

dalam pengelolaannya. Akan tetapi, kualitas SDM pengurus yang ada saat ini cenderung menjadi salah satu kendala internal yang perlu mendapat perhatian khusus agar bisa memiliki kompetensi dan mampu menggerakkan koperasi sebagai usaha peningkatan ekonomi kerakyatan. Sebagai salah satu upaya peningkatan SDM pengurus koperasi dan mewujudkan tiga sehat koperasi yaitu sehat organisasi, sehat usaha dan sehat mental. Untuk memujudkan peranan koperasi sebagai tulang punggung perekonomian dan alat perjuangan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, tentunya koperasi harus dikelola sebaik mungkin.

Sumber daya manusia yang ada didalam suatu organisasi seyogyanya berfungsi untuk memajukan organisasi berdasarkan peran yang diberikan, untuk mencapai hal tersebut maka sumber daya yang terlibat senantiasa mengembangkan dirinya melalui berbagai metode, bahwa pelatihan adalah mempersiapkan orang untuk melakukan pekerjaan mereka sekarang dan pengembangan mempersiapkan pegawai yang membutuhkan pengetahuan, keterampilan dan sikap. Oleh sebab itu diperlukan pula kualitas SDM dalam mengelola kelembagaan sebagaimana dalam penelitian yang dilakukan oleh Gilan, Nader Rajabi; Reshadat, dkk, (2012) bahwa penilaian terhadap kebutuhan koperasi, teknik pelatihan dan pendidikan yang berlaku, senantiasa melakukan program pendidikan dan pelatihan. Shofiatu Rahmah Sugis, (2011) bahwa

terdapat pengaruh positif dari variabel modal insani (dengan indikator pelatihan umum dan pelatihan spesifik) dan variabel modal sosial (dengan indikator dimensi struktural, dimensi relasional, dan dimensi kognitif) terhadap kinerja kelembagaan.

Menurut Veithzal Rivai (2003), Sumber Daya Manusia adalah seorang yang siap, mau dan mampu memberi sumbangan usaha pencapaian tujuan organisasi. Manajemen Sumber Daya Manusia menurut Gary Dessler (1997) adalah kebijakan dari praktik yang dibutuhkan seseorang untuk menjalankan aspek “orang” atau Sumber Daya Manusia dari posisi seorang manajemen, meliputi perekrutan, penyaringan, pelatihan, pengimbalan dan penilaian. Oleh sebab itu, sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya mempunyai peran yang sangat strategis dalam memberikan pelayanan secara maksimal, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Catherine; Hoyt, Ann, (2009) bahwa pelayanan berfokus pada kegiatan hidup sehari-hari yang berperan untuk pelaku yang telah diberikan oleh kombinasi dari organisasi nirlaba dan koperasi.

Pelatihan sumber daya manusia mengacu pada serangkaian kegiatan yang memberikan peluang kepada setiap karyawan untuk mendapatkan dan meningkatkan keterampilan yang berkaitan dengan pekerjaan. Program pelatihan sumber daya manusia umumnya diberikan kepada karyawan yang baru maupun karyawan

yang telah ada, tujuannya adalah agar setiap karyawan tersebut mampu menghadapi situasi-situasi yang selalu berubah. Sementara itu program pengembangan sumber daya manusia bertujuan untuk mengembangkan keterampilan untuk pekerjaan masa depan. Pengembangan sumber daya manusia merupakan suatu proses pendidikan jangka panjang yang mempergunakan prosedur sistematis dan terorganisir dimana karyawan manajerial mempelajari pengetahuan konseptual dan teoritis guna mencapai tujuan umum. Program pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia merupakan upaya untuk pengembangan sumber daya manusia, terutama untuk pengembangan kemampuan intelektual dan kepribadian. Pendidikan pada umumnya berkaitan dengan mempersiapkan calon tenaga yang digunakan oleh suatu organisasi, sedangkan pelatihan sumber daya manusia lebih berkaitan dengan peningkatan kemampuan atau keterampilan pekerja yang sudah menduduki suatu jabatan atau tugas tertentu.

Program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia merupakan istilah-istilah yang berhubungan dengan usaha-usaha berencana yang diselenggarakan untuk mencapai penguasaan skill, pengetahuan, dan sikap-sikap pegawai atau anggota organisasi. Pengembangan sumber daya manusia lebih difokuskan pada peningkatan kemampuan dalam pengambilan keputusan dan memperluas hubungan manusia bagi manajemen tingkat atas dan

manajemen tingkat menengah sedangkan pelatihan sumber daya manusia dimaksudkan untuk pegawai pada tingkat bawah (pelaksana), sehingga diharapkan karyawan semakin terampil dan mampu melaksanakan tanggung jawabnya dengan semakin baik, sesuai dengan standar. Dapat disimpulkan bahwa pelatihan dan pengembangan SDM adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia agar bisa menjadi sumber daya yang berkualitas baik dari segi pengetahuan, keterampilan bekerja, tingkat profesionalisme yang tinggi dalam bekerja agar bisa meningkatkan kemampuan untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dengan baik. Ilham (2013). Pelaksanaan Program Pelatihan Konsep, praktek, dan masa depan dari pengembangan sumber daya manusia. Siriwai Prapan, Somsri, (2000)

Tjahjono Widarmanto (2008). Kompetensi sumber daya manusia seluruh unsur penggerak koperasi, baik itu anggota, pengurus, maupun pengawas harus selalu digali, diasah, dan dikembangkan sehingga muncul pemikiran-pemikiran yang kreatif dan inovatif dalam pengembangan koperasi. Kompetensi yang harus dimiliki oleh para anggota, pengurus, dan penggerak koperasi meliputi kompetensi kelembagaan, kompetensi pengembangan usaha dan manajerial, kompetensi penguasaan iptek, kompetensi membangun networking, kompetensi pengembangan program penciptaan keunggulan persaingan usaha, kompetensi optimalisasi

pelayanan, dan kompetensi dalam membangun etos kerja. Semua kompetensi tersebut di atas apabila bisa dikembangkan secara maksimal akan menjadi kekuatan yang besar dalam membangun koperasi yang berkualitas. Selanjutnya Moehariono (2012) mengatakan bahwa di tempat kerja, apabila seseorang mempunyai kompetensi secara baik atau tinggi jika diintegrasikan dengan kompetensi jabatan, maka orang tersebut kemungkinan besar akan dapat menghasilkan kinerja yang optimal. Pengukuran kompetensi dasar pada setiap individu seseorang telah memudahkan pihak pengelola manajemen atau manager untuk lebih mudah menempatkan orang yang tepat dan tepat pada pekerjaannya (*the right man on the right job*).

Tri Budiarto, (2013), pendidikan dan pelatihan perkoperasian merupakan upaya untuk meningkatkan kompetensi dan komitmen SDM koperasi (wirakoperasi) yang mutlak diperlukan dalam pengembangan koperasi dalam jangka panjang. Pemahaman yang utuh terhadap koperasi dari anggota sebagai dampak kinerja pendidikan dan latihan, serta kinerja manajerial yang profesional sebagai *outcomes* pendidikan manajemen, sangat berpotensi menciptakan kepercayaan anggota. Mereka juga bersedia bergabung dengan koperasi dalam jangka panjang, serta menyesuaikan sikap dan perilakunya dengan strategi yang diterapkan koperasi. Manfaat-manfaat inilah yang akan menjadi

daya saing koperasi yang tidak mudah diikuti oleh pesaingnya. Kompetensi dan komitmen dapat dikaji pada berbagai tingkatan organisasi koperasi namun, tidak sedikit koperasi yang menyia-nyiaakan akan pelatihan dan pendidikan yang diberi, antara lain : a) kurangnya kesadaran anggota akan pentingnya pelatihan dan pendidikan, b) sudah merasa bahwa koperasi tersebut telah berhasil, c) kurangnya partisipasi anggota, d) merasa akan pemahaman tentang koperasi telah memadai, e) sosialisasi koperasi yang belum optimal, dan f) banyak dari anggota, pengurus, maupun ketua koperasi yang kurang mendukung berjalannya koperasi. Selanjutnya dijelaskan bahwa koperasi dapat berhasil apabila memenuhi kriteria aspek mikro dan aspek makro.

Kriteria aspek mikro adalah berkaitan dengan fungsi dan aspek-aspek pendukungnya yakni guna memenuhi kebutuhan dari para anggota sehingga mampu mensejahterakan anggota-anggotanya. Keberhasilan sebuah koperasi sangat dipengaruhi oleh proses pendirian koperasi itu sendiri dan terdapatnya tujuan koperasi untuk mensejahterakan anggotanya berdasarkan kebutuhan bersama dari pada anggotanya tersebut. Pendidikan dan pelatihan perkoperasian merupakan upaya untuk meningkatkan kompetensi dan komitmen sumber daya koperasi (wirakoperasi) yang mutlak diperlukan dalam pengembangan koperasi dalam jangka panjang. Pemahaman yang utuh terhadap koperasi dari anggota sebagai

dampak kinerja pendidikan dan latihan, serta kinerja manajerial yang profesional sebagai *outcomes* pendidikan manajemen, sangat berpotensi menciptakan kepercayaan anggota.

Rani Puspitasari (2003), manajemen koperasi yang kurang berkembang diantaranya disebabkan oleh kurang apiknya pengelolaan oleh sumber daya manusia yang kurang begitu kompeten dalam menghadapi kemajuan zaman dan teknologi. Manusia sekarang memang kurang memahami apa arti manajemen itu sendiri, oleh karnanya hampir dalam segala aspek dan bidang terutama koperasi tidak dapat terorganisir antara pekerjaan yang satu dengan yang lain, serta kurang terorganisir juga hubungan antara atasan dengan anggota dibawahnya. Solusi yang tepat dalam menangani masalah ini adalah dengan cara lebih memerhatikan para anggota dalam melakukan segala tindak pekerjaannya, serta dengan cara memberikan penyuluhan secara rutin kepada anggota pada kurun waktu yang sama.

Peneliti berargumentasi berdasarkan penjelasan di atas, bahwa kompetensi sumber daya manusia dapat dicapai jika program pelatihan seperti simulasi pelatihan usaha, pelaksanaan kegiatan dan model pelatihan berbasis teknologi dan UKM yang berorientasi kreatif dan inovatif optimal dilaksanakan. Selain itu dilaksanakan pengawasan dan evaluasi kegiatan pelatihan usaha yang telah dilaksanakan.

G. Kinerja Kelembagaan

Dalam ilmu ekonomi banyak sekali indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja, menggambarkan kondisi, menjelaskan situasi tertentu, atau membuat bentuk dari suatu ketidakteraturan yang terjadi pada suatu dimensi tertentu. Salah satu elemen kunci untuk mengukur level kinerja organisasi adalah dengan menetapkan serangkaian indikator kinerja utama yang dianggap relevan dan penting. Indikator kinerja utama atau (*key performance indicators*) merupakan kriteria yang bersifat terukur (*measurable*) dan dianggap sebagai parameter kunci untuk menentukan keberhasilan organisasi atau lembaga. Secara umum, kinerja merupakan prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. Untuk itu agar koperasi tetap dapat hidup di sektor ekonomi, maka salah satu teknik penanggulangan kemiskinan adalah menciptakan lapangan kerja, pembangunan pedesaan dan lainnya bahkan pembiayaan usaha kecil dan menengah, termasuk keputusan tentang pengelolaan keuangan yang mempengaruhi kinerja koperasi secara total, Simeyo Otieno, (2013).

Torka, Nicole; Looise, (2011) menjelaskan bahwa partisipasi pekerja dalam perusahaan adalah kunci utama memberikan kontribusi untuk mengekspresikan perilaku inovatif. Departemen pemasaran pada setiap organisasi adalah internal faktor

paling penting dan komunikasi yang efektif mempunyai peranan mempromosikan kinerja. Menurut Moehariono, (2012), Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis. Kinerja dalam sebuah lembaga merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan lembaga yang telah ditetapkan. Kinerja dapat diketahui dan diukur jika organisasi telah mempunyai kriteria atau standar keberhasilan tolak ukur yang ditetapkan oleh organisasi tersebut. Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen, dan yang memberikan kontribusi pada ekonomi. Dengan demikian manajemen kinerja adalah aktivitas untuk memastikan bahwa sasaran organisasi telah dicapai secara konsisten dalam cara-cara yang efektif dan efisien. Manajemen kinerja bisa berfokus pada kinerja dari suatu organisasi, fungsi, karyawan, atau bahkan proses untuk menghasilkan produk atau layanan, dan juga di area yang lain.

Brudan (2010) menjelaskan bahwa baik di tingkatan organisasi ataupun individu, salah satu fungsi kunci dari manajemen adalah mengukur dan mengelola kinerja. Antara gagasan, tindakan dan hasil terdapat suatu perjalanan yang harus ditempuh. Dan barangkali istilah yang paling sering digunakan di keseharian yang

menggambarkan perkembangan dari perjalanan tersebut dan juga hasilnya adalah "kinerja"(id.wikipedia.org/.../Manajemen). Jocheb Ropke, 1997; Garbarino and Johnson 1999, Gruen et al. 2000. Menjelaskan bahwa upaya yang dilakukan anggota koperasi yang ditunjukkan melalui capaian hasil selama pelaksanaan kegiatan operasional dalam periode tertentu.

Robbins (1994) mengemukakan bahwa : *“performance is the measurement of result, it asks the simple question did you get the job done”*. Yang dapat diartikan bahwa kinerja merupakan ukuran suatu hasil yang menyatakan pertanyaan sederhana apa yang anda peroleh dari tugas yang telah dilaksanakan. Ramudi Ariffin, (2010) Mengukur kinerja koperasi baik sebagai unit-unit ekonomi mikro maupun makro sebagai gerakan ekonomi rakyat, dapat dilakukan dari berbagai segi menurut kepentingannya. Tetapi indikator apapun yang hendak ditampilkan seharusnya tidak dilepaskan dari dasar pengevaluasiannya yaitu tujuan dikembangkannya kehidupan berkoperasi yaitu dalam upaya membangun ekonomi masyarakat secara mandiri. Bantuan diberikan harus ditempatkan sebagai faktor stimulus yang membangkitkan respon untuk mampu menolong diri sendiri, bertanggung jawab sendiri dan percaya diri. Makna dan isi dari istilah kinerja secara komprehensif didiskusikan oleh Folan et al

(2007) yang menegaskan tiga prioritas dari kinerja (id.wikipedia.org/):

- Pertama, kinerja butuh dianalisa berdasarkan setiap entitas di dalam lingkup lingkungan di mana dia beroperasi. Sebagai contoh kinerja suatu perusahaan harusnya dianalisis di lingkup target pasar di mana dia beroperasi dan bukannya yang tidak relevan dengan wilayah operasinya.
- Kedua, kinerja selalu terkait dengan satu atau lebih tujuan organisasi yang ditentukan oleh organisasi yang mana kinerjanya dianalisa. Oleh karenanya, suatu organisasi mengevaluasi kinerjanya berdasarkan pada tujuan dan target yang ditentukan dan diterima secara internal dan bukannya atas target yang digunakan oleh entitas di luar dirinya.
- Ketiga, kinerja disaring menjadi karakteristik yang relevan dan bisa dikenali.

Blumenthal (2003) menyatakan bahwa peningkatan kinerja bisa merupakan hasil perbaikan dari salah satu atau lebih aspek berikut ini: (1) Stabilitas organisasi yang terkait apakah layanannya bisa secara konsisten dihantarkan dan organisasi bisa terus bertahan; (2) Stabilitas finansial yang terkait dengan kemampuan organisasi dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, semisal,

kemampuan untuk membayar tagihan-tagihan. Stabilitas finansial seringkali kurang dihiraukan sebagai perihal yang penting dalam pembangun kapasitas; (3) Kualitas program (produk dan layanan) yang didasarkan pada indikator dampak, termasuk riset memadai tentang bagaimana program yang efektif serta sistem pengelolaan hasil keluaran; (4) Pertumbuhan organisasi yang didasarkan pada kemampuan mendapatkan sumberdaya dan menyediakan lebih banyak layanan.

Dari definisi yang telah diuraikan di atas, peneliti berpendapat bahwa kinerja lembaga adalah proses dan hasil kerja (output) baik kualitas maupun kuantitas yang dicapai oleh suatu lembaga pada suatu periode waktu dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan visi dan misinya. Untuk itu kinerja lembaga koperasi dapat dicapai jika jumlah dan pertumbuhan usaha berjalan, tingkat perkembangan SHU dan penerimaan SHU tepat waktu, anggota koperasi semakin meningkat, selain itu tingkat pendapatan anggota semakin meningkat dan penambahan jumlah penyertaan modal anggota serta efisiensi pengelolaan hasil usaha.

H. Kesejahteraan

Tingkat kepuasan dan kesejahteraan adalah sesuatu yang saling berkaitan. Tingkat kepuasan berorientasi kepada keadaan individu atau kelompok, sedangkan tingkat kesejahteraan mengacu

kepada keadaan komunitas atau masyarakat luas. Oleh sebab itu kesejahteraan adalah kondisi agregat dari kepuasan individu-individu.

Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat. Todaro (2000) mengemukakan bahwa kesejahteraan masyarakat menengah kebawah dapat direpresentasikan dari tingkat hidup masyarakat. Tingkat hidup masyarakat ditandai dengan terentaskannya dari kemiskinan, tingkat kesehatan yang lebih baik, perolehan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan tingkat produktivitas masyarakat.

Konsep kesejahteraan menurut Nasikun (1996) dapat dilihat dari empat indikator yaitu : (1) rasa aman (*security*), (2) Kesejahteraan (*welfare*), (3) Kebebasan (*freedom*), dan (4) jati diri (*identity*). Dalam memahami realitas tingkat kesejahteraan, pada

dasarnya terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan tingkat kesejahteraan antara lain : (1) sosial ekonomi rumah tangga atau masyarakat, (2) struktur kegiatan ekonomi sektoral yang menjadi dasar kegiatan produksi rumah tangga atau masyarakat, (3) potensi regional (sumberdaya alam, lingkungan dan inprastruktur) yang mempengaruhi perkembangan struktur kegiatan produksi, dan (4) kondisi kelembagaan yang membentuk jaringan kerja produksi dan pemasaran pada skala lokal, regional dan global.

E. Mitchell, John (2010), kesejahteraan pembangunan berkelanjutan mengacu pada kemampuan suatu bangsa atau Negara untuk memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi mereka sendiri. Manajemen yang berkelanjutan mempertimbangkan semua aspek lingkungan hidup, ekonomi, dan nilai-nilai social untuk mencapai suau masa depan berkelanjutan. Yudtriasnanto, (2011) jadi *sustainable management asset* berfungsi sebagai dasar pengelolaan masyarakat dan asset yang mereka miliki dalam usaha pencapaian tujuan *sustainable asset management*, dengan *sustainable development* sebagai konsep pembangunan yang berkelanjutan yang kemudian dalam aplikasinya mencapai tujuan tersebut dengan menggunakan prinsip ekonomi kerakyatan berupa pembentukan masyarakat sebagai pemilik dan pelaksana dari upaya pencapaian kesejahteraan mereka. Untuk itu diperlukan kebijakan-kebijakan

untuk membangun pemberdayaan masyarakat pesisir melalui proses kegiatannya. Indikator kesejahteraan rakyat menurut BPS Indonesia (2014) adalah kependudukan, kesehatan dan Gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan kemiskinan dan sosial lainnya.

Stookey (2010), Secara umum kesejahteraan masyarakat pesisir dapat dilakukan dengan cara meningkatkan aksesibilitas mereka aspek sosial, ekonomi dan budaya. Secara sosial, beban kemiskinan yang mereka hadapi akan dapat diatasi dengan cara menyediakan untuk mereka bantuan sosial. Secara ekonomi, beban mereka akan juga dapat diatasi melalui dukungan modal. Secara budaya, beban mereka akan dapat mereka atasi sendiri dengan cara membangkitkan etos kerja dan motivasi bekerja melalui peningkatan keterampilan kerja mereka. Tingkat kesejahteraan anggota melalui usaha yang dijalankan dengan keberadaan koperasi, tingkat taraf hidup masyarakat melalui hasil usaha yang dijalankan dengan bantuan modal koperasi.

Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat kita yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkat kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Lebih lanjut dijelaskan bahwa upaya memberdayakan

masyarakat harus dilakukan melalui tiga jurusan, yaitu: pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Di sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). Dalam rangka pemberdayaan ini, upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses kepada sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar. Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat.

Kesejahteraan meliputi seluruh bidang kehidupan manusia. Mulai dari ekonomi, sosial, budaya, iptek, hankamnas, dan lain sebagainya. Bidang-bidang kehidupan tersebut meliputi jumlah dan jangkauan pelayanannya. Pemerintah memiliki kewajiban utama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Beberapa indikator kesejahteraan diantaranya adalah jumlah dan pemerataan pendapatan, hal ini berhubungan dengan masalah ekonomi. Pendapatan berhubungan dengan lapangan kerja, kondisi usaha, dan faktor ekonomi lainnya. Penyediaan lapangan kerja mutlak dilakukan oleh semua pihak agar masyarakat memiliki pendapat

tetap untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kesempatan kerja dan kesempatan berusaha diperlukan agar masyarakat mampu memutar roda perekonomian yang pada akhirnya mampu meningkatkan jumlah pendapatan yang mereka terima, dengan pendapatan masyarakat dapat melakukan transaksi ekonomi. Kesempatan mengikuti pendidikan, taraf hidup anggota didasarkan pada kebutuhan pendidikan keluarga. Rusdiana dan Wahyuning (2009), perkembangan usaha anggota taraf hidup anggota didasarkan pada perkembangan usaha keluarga.

Prawirokusumo, (2001), atas adanya kesempatan anggota koperasi mengikuti pendidikan dan berkembangnya usaha anggota koperasi menunjukkan adanya tingkat kesejahteraan anggota koperasi. Tingkat kepuasan dan kesejahteraan adalah dua pengertian yang saling berkaitan. Tingkat kepuasan merujuk kepada keadaan individu atau kelompok, sedangkan tingkat kesejahteraan mengacu kepada keadaan komunitas atau masyarakat luas. Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Stookey, 2010; ZaId & Rao, 2003, bahwa tingkat taraf hidup anggota melalui hasil usaha yang dijalankan dengan bantuan modal koperasi. Taraf hidup anggota didasarkan pada kebutuhan pendidikan keluarga (Ciptani, 2000; Rusdiana dan Wahyuning, 2009). Teori kesejahteraan secara umum dapat diklasifikasi menjadi tiga macam, yakni *classical utilitarian*, *neoclassical welfare theory* dan *new contractarian approach* (Albert dan Hahnel, 2005). Pendekatan *classical utilitarian* menekankan bahwa kesenangan atau kepuasan seseorang dapat diukur dan bertambah. Prinsip bagi individu adalah meningkatkan sebanyak mungkin tingkat kesejahteraannya, sedangkan bagi masyarakat peningkatan kesejahteraan kelompoknya merupakan prinsip yang dipegang dalam kehidupannya. Pendekatan *neoclassical welfare theory* menjelaskan bahwa fungsi kesejahteraan merupakan fungsi dari semua kepuasan individu. Perkembangan lainnya dalam teori kesejahteraan sosial adalah munculnya *new contractarian approach* yang mengangkat adanya kebebasan maksimum dalam hidup individu atau seseorang. Hal yang paling ditekankan dalam pendekatan *new contractarian approach* ini adalah individu akan memaksimalkan kebebasannya untuk mengejar konsep mereka tentang barang dan jasa tanpa adanya campur tangan.

Dari definisi yang telah diuraikan di atas, peneliti berpendapat bahwa kesejahteraan anggota koperasi dapat dicapai jika; anggota koperasi mempunyai peluang membiayai pendidikan keluarga, peluang memenuhi kebutuhan mengikuti kegiatan kursus keterampilan, tingkat kelancaran dan produktivitas usaha anggota, volume usaha dan pendapatan meningkat serta perkembangan pangsa pasar yang lebih meluas.

1. penelitian terapan adalah penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan ilmiah dengan suatu tujuan praktis yang hasilnya diharapkan segera dapat dipakai untuk keperluan praktis.
2. Penelitian kuantitatif adalah data berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan (*scoring*).
3. Sehat Kelembagaan Koperasi adalah terpenuhinya sehat organisasi, sehat *financial*, sehat usaha, dan kompetensi sumber daya manusia yang dapat memberikan kontribusi terhadap kinerja koperasi, sehingga tercapainya kesejahteraan anggota koperasi.

BAB III

MODEL KINERJA KELEMBAGAAN

Untuk membentuk kinerja lembaga koperasi dalam mencapai kesejahteraan anggota diperlukan indikator senantiasa melaksanakan RAT setiap tahun supaya dapat dievaluasi kemajuan koperasi, selain itu seluruh anggota koperasi wajib hadir jika diundang rapat dan diharapkan keterlibatannya berpartisipasi memberikan ide atau gagasan dan seluruh aktivitas koperasi merujuk serta mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi yang sudah ditetapkan, anggota bertanggung jawab jika diberikan tugas untuk kemajuan koperasi sebagai bahagian partisipasi mencapai kinerja koperasi. Charles B.Lowry and Paul J. Hanges, (2008) mengatakan konsep organisasi yang sehat merupakan salah satu yang memiliki profil yang di dalamnya beberapa iklim dimensi bekerja untuk menjaga sinergitas organisasi dan daya tanggap lembaga. Organisasi yang sehat melakukan kebijakan, praktik, dan prosedur yang memberdayakan karyawan dan hanya menekankan pentingnya terus menerus pembelajaran dan inovasi yang bersifat timbal balik untuk memenuhi tuntutan tersebut dari sebuah lingkungan yang selalu berubah, hal itu semua akan menentukan efektivitas organisasi dalam jangka panjang. Oleh karena itu, dari indikator yang telah disebutkan di atas dalam

membentuk sehat organisasi yang memiliki kontribusi terbesar pengaruhnya adalah senantiasa melibatkan anggota koperasi dalam setiap pelaksanaan rapat. Torca, Nicole; Looise, (2011) menjelaskan bahwa partisipasi pekerja dalam organisasi adalah kunci utama memberikan kontribusi untuk mengekspresikan perilaku inovatif.

Hussen (2006) menegaskan bahwa dalam organisasi, kecenderungan seseorang untuk turut aktif mengambil peran dalam menentukan kelangsungan hidup koperasi dalam melalui rapat keanggotaan. Artinya bahwa kecenderungan seseorang dalam organisasi harus berpartisipasi aktif memberikan kontribusi dalam kegiatan rapat tentang kemajuan koperasi, menjadi tanggung jawab anggota terhadap akuntabilitas kinerja kelembagaan koperasi dan potensi yang dimiliki. SB Hari Lubis (1987), bahwa Organisasi sebagai suatu kesatuan sosial dari sekelompok manusia yang saling berinteraksi menurut suatu pola tertentu sehingga setiap anggota organisasi memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing, sebagai suatu kesatuan mempunyai tujuan tertentu dan mempunyai batas-batas yang jelas, sehingga dapat dipisahkan secara tegas dari lingkungannya Artinya bahwa sinergitas organisasi dengan karyawan berkontribusi terhadap sehat organisasi. Fakta ini menekankan bahwa tanggung jawab anggota dan pengurus dalam organisasi menunjukkan indikator membangun sehat organisasi.

Rampalli, et.al (2013), menegaskan bahwa sehat organisasi berkenaan dengan orang-orang, bekerjanya organisasi, praktik pengelolaan, kesejahteraan dan kinerja karyawan. Artinya bahwa sehat organisasi dengan melibatkan orang-orang melakukan praktik pengelolaan organisasi berkontribusi untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan anggota. Cooper. C (1994) menyebutkan bahwa sehat organisasi termasuk di dalamnya adalah faktor intrinstik, yaitu; (a) budaya perusahaan, (b) cara manajerial, (c) cara kerja organisasi yang mempengaruhi kesehatan pekerja dan kesejahteraan, dan (d) kesehatan finansial. Artinya bahwa sehat organisasi berkenaan dengan fungsi managerial, pengelolaan keuangan serta memahami budaya organisasi. Fakta ini menegaskan bahwa apabila anggota senantiasa dilibatkan dalam rapat dan anggota bertanggung jawab dalam lingkungan organisasi dapat pula memiliki kontribusi untuk membentuk sehat organisasi. Torke, et.al (2011) menjelaskan bahwa partisipasi pekerja dalam organisasi adalah kunci utama memberikan kontribusi untuk mengekspresikan perilaku inovatif. Artinya bahwa tingkat kepatuhan pengurus dan anggota pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi merupakan kunci utama sehatnya organisasi koperasi. McNamara M. (2008) menegaskan bahwa untuk membentuk kapasitas organisasi diperlukan diversifikasi sumber daya dan keahlian, bekerja sama, koordinasi untuk melaksanakan

program. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh tingkat keterlibatan dan partisipasi anggota dalam memberikan gagasan atau ide dalam rapat, aktif memajukan koperasi terhadap sehat organisasi.

Hal ini membuktikan bahwa dengan meningkatkan kompetensi SDM dengan indikator pengembangan program pelatihan, pelaksanaan simulasi pelatihan usaha, evaluasi pengembangan program pelatihan, pelaksanaan kegiatan pelatihan usaha, pengembangan model pelatihan berbasis teknologi, berbasis UKM dan berorientasi kreatifitas dan inovatif akan mengantar kompetensi SDM koperasi. Dan dari indikator tersebut yang memiliki konstribusi terbesar pengaruhnya adalah pelaksanaan simulasi pelatihan usaha, bahwa bukan lagi saatnya lebih banyak mengutamakan seminar-seminar program pelatihan akan tetapi responden lebih tertarik jika pelaksanaan pelatihan dalam bentuk tehnis, artinya lebih senang dengan simulasi sambil praktek peran sebagai pengusaha dan setiap pelatihan dievaluasi kemajuannya, hal itu lebih memungkinkan dan lebih cepat memahami kompetensinya.

Kompetensi yang harus dimiliki oleh para anggota, pengurus, meliputi kompetensi kelembagaan, kompetensi pengembangan usaha dan menejerial, kompetensi penguasaan iptek, kompetensi membangun *networking*, kompetensi pengembangan program penciptaan keunggulan persaingan usaha, kompetensi

optimalisasi pelayanan, dan kompetensi dalam membangun etos kerja. Sejalan yang dikemukakan oleh Tjahjono Widarmanto (2008) bahwa kompetensi sumber daya manusia seluruh unsur penggerak koperasi, baik itu anggota, pengurus, maupun pengawas harus selalu digali, diasah, dan dikembangkan potensinya sehingga muncul pemikiran-pemikiran yang kreatif dan inovatif dalam pengembangan koperasi. Oleh sebab itu betapa pentingnya kompetensi SDM dibangun dalam rangka meningkatkan kinerja lembaga koperasi untuk mencapai kesejahteraan anggota koperasi sebab selama ini tidak sedikit koperasi tidak mampu bertahan disebabkan oleh masih rendahnya kompetensi SDM.

Selain kompetensi SDM dan kesehatan organisasi, turut memiliki kontribusi dalam meningkatkan kinerja lembaga koperasi adalah kesehatan *financial* dengan 9 (sembilan) indikator, yakni tingkat keaktifan pengurus melakukan perputaran dana, melaksanakan kegiatan pembiayaan operasional koperasi, melaksanakan evaluasi pendanaan, pengurus senantiasa melaporkan jasa simpanan, melaporkan perkembangan penggunaan dana, melaksanakan pelaporan perputaran dana, peningkatan perkembangan usaha, peningkatan pertumbuhan usaha koperasi, dan peningkatan jumlah pembagian SHU anggota. Untuk itu, salah satu tolok ukur keberhasilan kinerja koperasi dapat dilihat dari kemampuan dan kesehatan keuangannya bahwa sehatnya keuangan

koperasi jika pengurus optimal memanfaatkan dana yang ada untuk menumbuh kembangkan usaha oleh karena akan berdampak pada pendapatan koperasi yang meningkat, sehingga pembagian SHU anggota juga meningkat.

Oleh karena itu, yang dapat memberikan kontribusi terbesar adalah anggota sangat menginginkan dalam kepengurusan koperasi hendaknya anggota yang terlibat dalam koperasi untuk aktif menyimpan dananya secara sukarela dan anggota mengharapkan kepada pengurus koperasi agar senantiasa melaporkan secara terbuka atas dana yang tersimpan dari anggota, sehingga dana koperasi dapat meningkat untuk dapat dikembangkan perputarannya untuk membiayai usaha-usaha koperasi dan biaya operasional demi sehatnya pengelolaan keuangan koperasi. Keberadaannya sebagai anggota koperasi dilayani dengan baik setiap saat oleh pengurus jika mereka membutuhkan dana untuk membuka usaha-usaha lain untuk kebutuhan keluarganya dan diberi peran dalam menyusun rencana dan strategi usaha, sehingga dalam rapat anggota tahunan mereka puas atas laporan perkembangan usaha koperasi.

Sejalan yang dijelaskan Holmberg, Anitha; Frommegard, Lennart. (2005) bahwa pembiayaan terbaik menciptakan solusi yang baik. Untuk itu Aktivitas manajemen keuangan berhubungan dengan aktivitas penggunaan dana, yaitu aktivitas untuk menginvestasikan dana pada berbagai aktiva. Aktivitas perolehan

dana, yaitu aktivitas untuk mendapatkan sumber dana, baik dari sumber dana internal maupun sumber dana eksternal perusahaan, dan aktivitas pengelolaan aktiva, yaitu setelah dana diperoleh dan dialokasikan dalam bentuk aktiva, dana harus dikelola seefisien mungkin. Sejalan dengan hasil penelitian yang menemukan adanya pengaruh yang signifikan dan bersifat positif variabel sehat finansial terhadap kinerja lembaga koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi.

Demikian pula untuk menilai kinerja lembaga koperasi untuk mencapai kesejahteraan anggota diperlukan sehat usaha. Bagi organisasi yang sudah mapan ataupun belum tidak terkecuali koperasi sebagai badan usaha dituntut agar melakukan pengembangan usaha terus menerus guna mengantisipasi terjadinya kondisi persaingan usaha yang setiap saat mengalami perubahan. Untuk itu dalam mencapai sehat usaha diperlukan indikator-indikator, yakni; keterbukaan pengurus melayani konsultasi anggota, pelaksanaan layanan usaha anggota, pelaksanaan layanan kebutuhan atau pinjaman anggota, partisipasi anggota terhadap perkembangan usaha, partisipasi anggota membangun dan mengembangkan kerjasama, partisipasi dan kerjasama anggota membuat perencanaan usaha, partisipasi anggota dalam menyusun laporan usaha, peran anggota membuat perencanaan strategi usaha,

dan partisipasi anggota menemukan dan memanfaatkan peluang usaha.

Tantangan yang dihadapi koperasi tidak selalu berkaitan permodalan besar tetapi komitmen memajukan koperasi dari dalam; soliditas kerjasama dan tolong menolong. Faktor globalisasi, perdagangan bebas harus dilihat sebagai peluang sekaligus tantangan. Diperlukan langkah-langkah strategis menguatkan organisasi berbasis ekonomi ini, yang amat vital adalah adanya fasilitator atau pendamping yang dapat meyakinkan warga tentang urgensi berkoperasi, sebagai jawaban atas masa depan mereka yang mulai samar karena krisis multidimensi. Pemerintah harusnya menjalankan program yang tak sekedar menambah kuantitas koperasi tetapi membangun kesadaran kolektif seperti yang diharapkan Bung Hatta. Mimpi besar Pemprov. Sulsel untuk menjadikan Sulsel sebagai pilar utama pembangunan nasional sekaligus simpul jejaring kesejahteraan masyarakat mungkin akan tercapai jika mampu menangani unsur-unsur pembangunan seperti yang disebutkan sebelumnya, unsur penting seperti norma atau nilai-nilai kegotong royongan, tolong menolong dan menguatkan kapasitas kelembagaan ekonomi rakyat seperti koperasi. Memampukan mereka untuk tahu dan terampil serta berwatak positif dalam mengelola sumberdaya alam, produksi dan jasa. Selain itu, penguasaan teknologi informasi untuk mendukung pemasaran

produk koperasi juga amat dibutuhkan bersama penerapan manajemen modern.

Pengembangan kinerja lembaga koperasi pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh langsung dan bersifat positif variabel kinerja lembaga terhadap kesejahteraan anggota. Untuk membetuk kinerja lembaga koperasi diperlukan indikator-indikator, pertumbuhan usaha koperasi, penambahan hasil usaha yang dicapai dalam kurun waktu tertentu, pengembangan jumlah usaha yang dikelola koperasi, tingkat pertumbuhan jumlah anggota koperasi, tingkat pertumbuhan penyertaan modal anggota, tingkat pertumbuhan pendapatan anggota, tingkat perkembangan SHU, tingkat efisiensi pengelolaan SHU, dan tingkat penerimaan SHU tepat waktu. Dari indikator-indikator yang membentuk kinerja lembaga koperasi terdapat indikator yang memiliki pengaruh yang cukup besar adalah penambahan pendapatan anggota dan Sisa Hasil Usaha yang dicapai dalam kurun waktu tertentu diterima tepat waktu.

Peters J. (2013), menjelaskan pentingnya partisipasi pembangunan lembaga ekonomi, sehingga lembaga ekonomi akan mendapatkan bayak keuntungan dan lebih banyak melakukan pendekatan inovatif. Artinya bahwa untuk membetuk lembaga koperasi mencapai kinerjanya dibutuhkan partisipasi anggota

menumbuhkan dan mengembangkan usaha-usaha jika memperhatikan pertambahan pendapatan anggota dan pertumbuhan usaha anggota. Dasori, et.al (2002) menegaskan bahwa kinerja kelembagaan sosial ekonomi dalam keberlanjutannya harus berfokus pada penciptaan lingkungan hidup dan memungkinkan beradaptasi dengan masyarakat berbasis sumber daya alam. Artinya bahwa kinerja kelembagaan dalam keberlanjutannya harus berfokus pada penciptaan sinergitas adaptasi masyarakat dengan lingkungan. Fakta ini menegaskan bahwa membentuk kinerja kelembagaan diperlukan pertambahan pendapatan dan jumlah anggota, pertambahan sisa hasil usaha, dan pertumbuhan usaha. Rubach M. (1997) menyebutkan bahwa potensi membentuk kekuatan lembaga adalah (1) pemilik berperan aktif dalam urusan strategis kelembagaan, (2) pemilik membentuk mekanisme membangun hubungan, dan (3) peran para pemegang saham. Fakta ini menegaskan bahwa pertumbuhan usaha yang dijalankan lembaga, pertambahan hasil usaha yang dicapai dalam kurun waktu tertentu, dan pengembangan jumlah usaha yang dikelola koperasi memberi kontribusi kinerja kelembagaan mencapai kesejahteraan anggot koperasi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh bertambahnya pendapatan, sisa hasil usaha meningkat serta bertambahnya usaha dan bertambahnya jumlah anggota terhadap kinerja lembaga koperasi.

Hal itu sejalan yang dikemukakan oleh Moeheriono, (2012), Kinerja (*performance*) merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi. Kinerja dalam sebuah lembaga merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan lembaga yang telah ditetapkan. Kinerja dapat diketahui dan diukur jika organisasi telah mempunyai kriteria atau standar keberhasilan tolak ukur yang ditetapkan oleh organisasi tersebut. Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen, dan yang memberikan kontribusi pada ekonomi.

Dengan demikian manajemen kinerja adalah aktivitas untuk memastikan bahwa sasaran organisasi telah dicapai secara konsisten dalam cara-cara yang efektif dan efisien. Selanjutnya Robbins (2008) mengemukakan bahwa kinerja karyawan merupakan fungsi dari interaksi antara kemampuan (*ability*), motivasi (*motivation*), dan kesempatan (*opportunity*). Sejalan dengan tujuan koperasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Koperasi Nomor 25 tahun 1992 adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan

masyarakat yang maju, adil, dan makmur. Untuk itu dalam memperbaiki kinerja pengurus koperasi dibutuhkan beberapa upaya kongkrit diantaranya adalah semua aktivitas pengurus yang telah diberi amanah mengelola koperasi (*agent*) harus dipertanggungjawabkan di depan para anggota sebagai pihak pemberi amanah (*principal*).

Rapat Anggota Tahunan (RAT) harus dijadikan wahana evaluasi hasil kinerja tahunan para pengurus koperasi sebagai wujud akuntabilitas. Namun demikian secara obyektif disadari bahwa disamping ada koperasi yang sukses dan mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya, terdapat pula koperasi di Indonesia bahkan mungkin jauh lebih banyak kuantitasnya yang kinerjanya belum seperti yang kita harapkan. Koperasi pada kategori inilah yang memberi beban psikis dan juga trauma bagi sebagian kalangan akan manfaat berkoperasi.

Koperasi juga diharapkan dapat berperan serta dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional, serta berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Hal ini mengindikasikan bahwa selama ini eksistensi koperasi untuk mampu bertahan dalam menghadapi persaingan serta

mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya tidak terlepas dari kinerja lembaga yang dibangun melalui perkembangan usaha dan pangsa pasar serta peningkatan penghasilan usaha anggota, sehingga mampu memenuhi kebutuhannya.

Untuk memperbaiki sehat organisasi koperasi dibutuhkan beberapa upaya kongkrit; diantaranya adalah semua aktivitas anggota, pengurus dan pengawas yang telah diberi amanah mengelola koperasi harus mematuhi Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi dan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan bersama-sama berpartisipasi dan bertanggung jawab terhadap kinerja lembaga koperasi. Pengurus koperasi lebih aktif memperoleh dana dan melakukan perputaran dana seefektif mungkin untuk mengembangkan usaha-usaha yang produktif serta memperluas pangsa pasar. Adanya modal yang cukup maka koperasi akan mampu bersaing dengan usaha-usaha lain di luar koperasi. Untuk itu perencanaan dan pembuatan studi kelayakan usaha akan membantu dalam pelaksanaan usaha yang lebih kreatif. Agar senantiasa melaksanakan evaluasi pengembangan model program pelatihan usaha yang berorientasi kreatif dan inovatif dalam pengembangan kompetensi SDM, Dinas terkait sebagai pembina senantiasa menyediakan pendampingan dan bimbingan dan berperan aktif dalam pelaksanaan RAT serta melakukan kajian mendalam dan selektif terhadap pendirian koperasi, Dekopin

diharapkan dapat membangun sistem sentralistik potensi ekonomi Koperasi/Anggota Koperasi berbasis IT dan memantau perkembangan koperasi secara on line.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No.11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
- Undang-Undang No.25 Tentang Perkoperasian
- _____, 2015. BPS Kabupaten Pangkep Dalam Angka
- _____, 2015. BPS Kabupaten Takalar Dalam Angka
- _____, 2014. BPS Makassar Dalam Angka
- Albert dan Hahnel, 2005. Classical Utilitarian, Neoclassical Welfare Theory Dan New Contractarian Approach:
- Arifin Sitip Halomoan Tamba, 2001, Koperasi, Teori dan Praktek, Jakarta : Erlangga
- AM Yamin 2013. Kadis Koperasi dan UKM Provinsi Sulsel, Rakorda antara Dinas Koperasi dan UKM Sulsel dengan dinas yang membidangi se-Sulsel, di Hotel Kenari, Rabu (27/11).
- Barrett, Pamela Bowen. Penetapan AD & ART merupakan pertanggungjawaban pengurus sebagai cerminan akuntabilitas koperasi.
- Deliar Noer, Mohammad Hatta : Biografi Politik , (Jakarta : LP3ES, 1990), hlm. 541
- Dasori, Wuni P. Wilfrid Laurier University (Canada), ProQuest, UMI Dissertations
- Gagliardi, Francesca, 2009. Pertumbuhan dan perkembangan keuangan perusahaan koperasi dapat dilihat dari SHU yang dicapai.
- H. Masngudi, 1990. Penelitian Tentang Sejarah Perkembangan Koperasi Di Indonesia, (Jakarta : Badan Penelitian

- Pengembangan Koperasi Departemen Koperasi, 1990), hlm. 4.
- Hari Lubis SB dan Martani Huseini. 1987. Teori Organisasi Suatu Pendekatan Makro. PAU Ilmu Sosial Universitas Indonesia. Jakarta Hamid Basma. 2013. Ketua Dewan Koperasi Indonesia (Dekopinwil) Sulsel. (online 5 Januari 2015)
- Herlina Setiyarini, Wisnu, 2014. Jurnal Pendidikan Sejarah. Pemikiran Mohammad Hatta Tentang Ekonomi Koperasi Tahun 1925-1953. Volume 2, No. 3, Oktober 2014.
- Herry Yulistiyono, 2007. Evaluasi Penguatan Kelembagaan Koperasi Masyarakat Nelayan Di Kabupaten Bangkalan. Dosen Prodi Ekonomi Pembangunan - Fakultas Ekonomi Unijoyo. Jurnal (online 10 Januari 2015)
- Holmberg, Anitha; Frommegard, Lennart, 2005. Financing Cooperative: Proving that the Best Financing Solutions are Created Together. Government Review. Publication Governmen Finance Officers Assosiation. ISSN 08837856. Vol.21, Issue 3. Page 30-34
- Hussain, dkk, 2006, "SME financing in the UK and in China: a comparative perspective", *Journal of Small Business and Enterprise Development* Volume: 13.
- Ilham, 2013. www.pelatihan-sdm.net/...elatihan-dan-pengembangan-sd. (online 10 Februari 2016)
- Jocheb Ropke, 1997. Perkembangan Jumlah Anggota memberikan kontribusi terhadap peningkatan SHU.
- Jocken Ropke, 2000, Ekonomi dan Koperasi, teori dan Manajemen (Terjemahan), Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- John E. Mitchell, 2010. Criteria and Indicators of Sustainable Rangeland Management University of Wyoming

Cooperative Extension Service Publication SM-561. A publication of the Sustainable Rangelands Roundtable (Monograph 1)₂ and the Society for Range Management (Monograph 4). © University of Wyoming and Society for Range Management.

Kamaruddin Aziz, 2015. Sekretaris Umum Perkasa 89, Membangun Ekonomi Sulsel, Mungkinkah dengan Koperasi?. Bekerja sama dengan Tribun Timur dalam Tudang Sipulung.

Malayu SP Hasibuan. 2001. Organisasi dan Motivasi Dasar

McNamara, Madeleine Wright, (2008). Old Dominion University, ProQuest, UMI Dissertations Publishing, 3338107 Moehariono, 2012. Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi. Ed. Revisi. Cet. 1. Jakarta: Rajawali Pers.

Moehariono, 2012. Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi. Ed. Revisi. Cet. 1. Jakarta: Rajawali Pers.

Nasikun, Dr. 1996. Urbanisasi dan Kemiskinan di Dunia Ketiga. PT. Tiara Wacana. Yogyakarta.

North, North DC. 1990. Institutions, Institutional Change and economic Performance. Cambridge University Press

Parsons, Talcott. 1937. "The Structure of Social Action New York: MCGraw-Hill. George Ritzel. 2012. Teori Sosiologi (dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern), Ed. 8. Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Peters, John Edward. University of Southern California, ProQuest, UMI Dissertations Publishing, 2003. 3103958.

- Prawirokusumo, 2001. Perkembangan profitabilitas usaha, Taraf hidup anggota didasarkan pada perkembangan profitabilitas usaha anggota.
- Puspayoga (2016). Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam Peringatan Hari Koperasi ke-69 18 Juli Tahun 2016
- Ramudi Arifin, 2010. Dasar-Dasar Pengukuran Kinerja Koperasi. Coopetition Vol.I No.1 Maret 2010.
- Rani Puspita Sari. 2013. Penyebab Koperasi Di Indonesia Sulit Berkembang.
<https://ranipuspitasaki.wordpress.com/.../softskillpenye..> (Online, 2015)
- Rampalli Prabhakara Raya, (2013). Sivapragasam Panneerselvam. The healthy organization
- Rivai, Veithzal, Deddy Mulyadi 2012. Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi, --ed. 2-9-, Jakarta; Rajawali Pers
- Robbins, Stephen P. 1994. Organizational Behavior Concepts, Controversies, Applications. Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey.
- Robbins SP, dan Judge. 2007. Perilaku Organisasi, Jakarta :
- Rummler GA, Brache AP (1995) *Improving performance: How to manage the white space in the organization chart* (2nd ed.). Wiley John & Sons Inc, New York.
- Rusdiana dan Wahyuning, 2009. Kesempatan mengikuti pendidikan Taraf hidup anggota didasarkan pada kebutuhan pendidikan keluarga
- Rubach, Michael Joseph, (1997). The University of Nebraska - Lincoln, ProQuest, UMI Dissertations Publishing, 9736949.
- Saudin Sijabat, 2010. Kajian Pengendalian Anggota pada Koperasi Dalam Rangka Peningkatan Kinerja Koperasi.

- Shofiatsu Rahmah Sugis, 2011. Model Peningkatan Kinerja Usaha Kecil Menengah Melalui Pengembangan Modal Insani dan Modal Sosial. (online 16 Maret 2015)
- Simeyo Otieno, 2013. An Assessment of Effect of Government Financial Regulations on Financial Performance in Savings and Credit Cooperative Societies (SACCOs): A study of SACCOs in Kisii Central, Kenya Department of Business and Management School of Business and Economics Jaramogi Oginga Odinga University of Science and Technology P.O. Box 210 - 40601 Bondo-Kenya,
- Sitio. Arifin, Halomoan Tamba. 2001. Koperasi: Teori dan Praktik. Jakarta : Erlangga
- Subandi, 2013. Ekonomi Koperasi. Cetakan ke 3 Penerbit Alfabeta Bandung
- Syahyuti, 2006. Tinjauan Sosiologis Terhadap Konsep Kelembagaan Dan Upaya Membangun Rumusan Yang Lebih Operasional, Jurnal :Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian,
- Stookey, Sarah. 2010. Ownership, Participation and Commitment Business Renaissance Quarterly 5.3 (Fall): 85-114.
- Tjahjono Widarmanto. 2008. *Enam Puluh Satu Tahun Perjalanan Koperasi: Membangun Koperasi Berkualitas Berbasis Kompetensi SDM*. Edisi 90/68 Tahun IX/Juli
- Tony, dkk., 2003. Kelembagaan dan Kebijakan Dalam Pengembangan Agroforestri, (World Forestry Center)
- Torka, Nicole; Looise, Jan Kees; Zagelmeyer, Stefan, 2011. Ordinary Atypical Workers, Participation within the Firm and Innovation: A Theoretical Endeavor and Empirical Outlook.

- Torka, at.al. 2011. Ordinary Atypical Workers, Participation within the Firm and Innovation: A Theoretical Endeavor and Empirical Outlook.
- Tri Budiarto. 2013. Menuju Kelembagaan Koperasi yang Gemilang. *ekonomi.kompasiana.com/.../menuju-kelembagaan-ko (on line, 2015)*
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Departemen Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- Victor P.H. Nikijuluw, (2003). Direktur Pemberdayaan Masyarakat, Departemen Kelautan dan Perikanan.
- Widarmanto, T. 2008. Enam Puluh Satu Tahun Membangun Koperasi: Membangun Koperasi Berkualitas Berbasis Kompetensi SDM. Gemari, Edisi 90, Tahun IX Juli. hlm.68-69.
- Yona Perwitasari, Sri Witurachmi, Elvia Ivada 2013. Pendidikan Ekonomi-BKK Akuntansi, KIP Universitas Sebelas Maret Surakarta, 57126, Indonesia yona_perwitasari@yahoo.com
- Yuditriasnanto, 2011. Pemberdayaan Masyarakat Lokal Melalui Konsep Sustainable Asset Management dan Prinsip Ekonomi Kerakyatan. *prezi.com/.../perkembangan-konsep-sustainable-d (on line, 2015)*
- Zurnali, Cut (2010). Learning Organization, Competency, Organizational Commitment, dan Customer Orientation : Knowledge Worker-Kerangka Riset Manajemen Sumberdaya Manusia di Masa Depan. Jurnal (online, 11 Februari 2014)
- _____, Konsep Sustainable Development. (online 13 Desember 2014)

- _____, <http://id.wikipedia.org/wiki/Koperasidan>
<http://bumnwatch.com/peran-koperasi-dalam-perekonomian-indonesia/>. (on line 25 Desember, 2014)
- _____, [Komitmen organisasi - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.](http://id.wikipedia.org/wiki/Komitmen_organisasi)
id.wikipedia.org/wiki/Komitmen_organisasi. (online 10 Desember 2015)
- _____, 2014. teorionline.wordpress.com/2010/02/04/komitmen-organisasi. (online, 10 Desember 2015)

